

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban

2019

Monika Handayani



Diterbitkan Atas Kerjasama
Deependublish dengan Politeknik Banjarmasin



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

DILENGKAPI 100 SOAL LATIHAN DAN JAWABAN

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

DILENGKAPI 100 SOAL LATIHAN DAN JAWABAN

Monika Handayani



**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK :
DILENGKAPI 100 SOAL LATIHAN DAN JAWABAN**

Penulis :
Monika Handayani

e-ISBN :
978-623-92412-5-4 (PDF)

Editor dan Penyunting :
Adi Pratomo

Desain Sampul dan Tata Letak :
Rahma Indera; Eko Sabar Prihatin

Penerbit :
POLIBAN PRESS
Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Redaksi :
Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp : (0511)3305052
Email : press@poliban.ac.id

Dicetak oleh :
PERCETAKAN DEEPUBLISH
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Monika Handayani—Cet. I. — Akuntansi Sektor Publik : Dilengkapi 100 Soal Latihan
dan Jawaban : Poliban Press, 2019.

x ; 207 hlm.; 15.5x23 cm

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban tahun 2019 telah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pengantar bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dalam perkuliahan Akuntansi Sektor Publik di Politeknik.

Terima kasih disampaikan kepada Joni Riadi S.ST., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dan Nurmahaludin, S.T., M.T. selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat beserta sekretaris dan staf. Terima kasih juga disampaikan kepada Faris Ade Irawan, Reza Fauzan, Eko Sabar Prihatin dan Rahma Indera yang telah berkontribusi dalam editing serta seluruh tim Poliban Press dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Politeknik khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, Agustus 2019

Ketua Poliban Press

Prakata

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNyalah Buku ajar ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan semoga bisa bermanfaat sebagai media ajar bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, khususnya untuk mahasiswa semester 5 (lima) D3 Komputerisasi Akuntansi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, disamping itu buku ajar ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur dalam memperkuat pemahaman terhadap akuntansi Sektor publik yang biasanya digunakan untuk pemerintahan maupun organisasi non profit.

Buku Ajar ini disusun berdasarkan teori dan praktik yang di dapat oleh penulis baik dari bangku kuliah, maupun praktik di dunia kerja, beberapa kasus diambil dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bidang akuntansi sektor publik. Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal dan jawaban yang membantu pembaca semakin memahami Akuntansi Sektor Publik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk membuat buku ajar ini. Besar harapan agar buku ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik secara khusus.

Banjarmasin, Agustus 2019

Penulis

Monika Handayani

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Poliban Press karena telah mempercayakan proses percetakan buku Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban kepada Penerbit Deepublish. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dan kerja sama ini dapat terus terjalin.



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Prakata.....	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi	viii
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	1
1.1. Sejarah Singkat Akuntansi Sektor Publik.....	1
1.2. Pengertian Sektor Publik.....	2
1.3. Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik.....	3
1.4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	3
1.5. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik	3
1.6. Akuntabilitas Publik.....	4
1.7. Privatisasi.....	6
1.8. Otonomi daerah.....	6
1.9. Good Governance	7
BAB 2 KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & AKUNTANSI SEKTOR PRIVAT.....	9
2.1. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Privat	9
2.2. Sektor Publik dan Perbandingannya dengan Sektor Bisnis (Privat)	11
2.3. Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat).....	15
2.4. Penganggaran dalam Sektor Publik dan sektor Bisnis (Privat)	17
2.5. Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)	17

2.6.	Standar Akuntansi Keuangan untuk Organisasi Nirlaba.....	18
2.7.	Perkembangan Regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintah.....	19
2.8.	Contoh Komparasi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Bisnis.....	22
2.9.	Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	23
2.10.	Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis.....	24
2.11.	Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	24
2.12.	Pelaporan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	25
2.13.	Audit dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	27
2.14.	Pertanggungjawaban dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	28
2.15.	Standar Audit Sektor Publik.....	28
2.16.	Fungsi Standar Audit Sektor Publik.....	29
2.17.	Contoh Organisasi Sektor Publik Dan Swasta (Privat).....	36
2.18.	Contoh Anggaran Sektor Publik dan Sektor Swasta (Privat).....	39
BAB 3	KEUANGAN NEGARA & PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK.....	43
3.1.	Keuangan Negara.....	43
3.2.	Jenis-jenis Penganggaran.....	45
3.3.	Siklus Anggaran.....	48
3.4.	Siklus APBN dan APBD.....	49
BAB 4	AKUNTANSI PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.....	55
4.1.	Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik.....	55

4.2. Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik	58
4.3. Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	60
4.4. Akuntansi Manajemen di Sektor Publik	61
4.5. Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan di Sektor Publik	66
4.6. Contoh Kasus	67
BAB 5 TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	69
5.1. Fokus Pengukuran	69
5.2. Sistem Pencatatan dan Basis Akuntansi.....	71
5.3. Teknik Akuntansi Sektor Publik.....	77
BAB 6 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	93
6.1. Dasar Hukum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	93
6.2. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	95
6.3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	97
6.4. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	97
6.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.....	100
6.6. Pengendalian Internal.....	101
6.7. Jenis Transaksi.....	109
6.8. Kode Rekening.....	111
6.9. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	114
6.10. Dokumen Sumber.....	120
6.11. Formulir dan Jurnal.....	130
6.12. Laporan Keuangan Daerah.....	131
6.13. Pendapatan Asli Daerah.....	133
SOAL DAN JAWABAN.....	135
Daftar Pustaka	205
Glosarium	207

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami definisi akuntansi sektor publik
2. Mampu menyebutkan ciri-ciri organisasi sektor publik
3. Mampu mengetahui dan memahami tujuan akuntansi sektor publik
4. Menyebutkan komponen *good governance*

Akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan.

1.1. Sejarah Singkat Akuntansi Sektor Publik

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Kam (1990) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi.

Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat.

Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:

- Semangat kapitalisasi (*Capitalistic Spirit*).
- Peristiwa politik dan ekonomi (*Economic and Politic Event*).
- Inovasi teknologi (*Technology Inovation*).

Sejarah di Mesir, Organisasi kementerian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri. Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak, di Babilonia praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi, di Yunani, pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon dan telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak.

Islam, melakukan Pencatatan kekayaan pemerintahannya dengan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah. Baitul mal sebagai bendahara/keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi. Sejarah Organisasi Sektor Publik di Inggris (Abad 15). Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan, pelaporan keuangan dirinci lebih rinci diantaranya tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran.

Sejarah Organisasi Sektor Publik, pada abad 18 terjadi perubahan mendasar diantaranya: Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya, adanya revolusi industri, pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 19-20 dimulai dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah, pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjannya, adanya praktik audit atas dana pemerintah namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain

1.2. Pengertian Sektor Publik

Pengertian Sektor Publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai "suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa

untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik". Sektor Publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan Negara.

1.3. Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik

Adapun ciri-ciri dari organisasi sektor publik diantaranya:

- Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial
- Dimiliki secara kolektif oleh publik
- Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan
- Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif.

1.4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

1.5. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi:

- a) Faktor ekonomi meliputi antara lain:
 - Pertumbuhan ekonomi
 - Tingkat inflasi
 - Tenaga kerja
 - Nilai tukar mata uang

- Infrastruktur
 - Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- b) Faktor politik meliputi antara lain:
- Hubungan negara dan masyarakat
 - Legitimasi pemerintah
 - Tipe rezim yang berkuasa
 - Ideologi negara
 - Elit politik dan massa
 - Jaringan Internasional
 - Kelembagaan
- c) Faktor kultural meliputi antara lain:
- Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
 - Sistem nilai di masyarakat
 - Historis
 - Sosiologi masyarakat
 - Karakteristik masyarakat
 - Tingkat pendidikan
- d) Faktor demografi meliputi antara lain:
- Pertumbuhan penduduk
 - Struktur usia penduduk
 - Migrasi
 - Tingkat kesehatan

1.6. Akuntabilitas Publik

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara) Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik.

1.7. Privatisasi

Di Indonesia masih banyak BUMN dan BUMD yang dijalankan tidak secara efisien. Inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk.

Di era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan antara lain:

- *Regulation & Political Pressure*
- *Social Pressure*
- *Rent Seeking Behaviour*
- *Economic & Efficiency*

Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.

1.8. Otonomi daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi tidak hanya

berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi

1.9. Good Governance

Good Governance diartikan sebagai cara kelola urusan publik. World Bank, mendefinisikan: sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan: akuntabilitas publik sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.

Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Karakteristik “*Good Governance*” menurut UNDP,

- *Participation,*
- *Rule of law,*
- *Transparency,*
- *Responsiveness,*
- *Consensus orientation,*
- *Equity,*
- *Efficiency and effectiveness,*
- *Accountability,*
- *Strategic vision.*

Dari 9 (sembilan) karakteristik tersebut, sekurangngnya ada tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu:

- Penciptaan transparansi,
- Akuntabilitas publik,
- *Value of money (economy, efficiency and effectiveness)*

Cara mewujudkan *Good Governance* diperlukan

- Reformasi sistem anggaran (*budgeting reform*),

- Reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*),
- Reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*), dan
- Reformasi sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*).

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan definisi Akuntansi Sektor Publik!
2. Apakah Tujuan Akuntansi Sektor Publik?
3. Sebutkan beberapa komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik!
4. Sebutkan dan jelaskan dimensi Akuntabilitas Publik!
5. Sebutkan 9 (Sembilan) karakteristik *Good Governance*!

BAB 2

KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & AKUNTANSI SEKTOR PRIVAT

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami tujuan komparasi akuntansi sektor publik dan sektor privat.
2. Mampu menyebutkan asumsi-asumsi sektor publik dan sektor privat
3. Mampu mengetahui dan memahami standard dan regulasi sektor publik
4. Mampu menyebutkan perbedaan dan persamaan sektor publik dan sector swasta
5. Mampu mengetahui dan memahami audit sektor publik

Tujuan Akuntansi sektor publik adalah memaksimalkan kinerja organisasi sektor publik

2.1. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Privat

Dalam realitas di masyarakat, akuntansi sektor publik maupun akuntansi bisnis (privat) ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Akuntansi sektor bisnis (privat) pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada publik. Namun, berbeda dengan akuntansi bisnis (privat), akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan.

Pada tataran konsep, materi Akuntansi Sektor Publik secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan sektor publik. Selain itu, munculnya perlawanan terhadap budaya manipulasi juga mendorong pemerintahan untuk lebih mengutamakan stabilitas. Dampak lainnya adalah mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai (reformasi), serta keahlian penyusunan sistem keuangan akan menjadi salah satu pilar transparansi ekonomi di Indonesia.

Pada awalnya, sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan layanan tertentu. Karena itu, area sektor publik sangatlah luas. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan sektor publik sering diserahkan kepada pasar, namun regulasi dari pemerintah tetap harus diikuti pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian, mereka semua mempunyai hak yang sama atas konsumsi barang dan juga pelayanan jasa publik. Karena itu, intervensi pemerintah dengan fungsi alokasinya atas penerimaan pajak masyarakat menjadi hal yang wajib.

Keunikan Akuntansi Sektor Publik adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu, perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktik regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang diterapkan dalam sektor publik umumnya berbasis kas, dan laporan keuangan yang dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi Sektor Publik dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang saham saja sebagaimana di sektor privat.

2.2. Sektor Publik dan Perbandingannya dengan Sektor Bisnis (Privat)

Pengertian sektor publik dapat kita ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sektor komersial. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanya. Beberapa kesamaan antara sektor publik dengan sektor komersial antara lain sebagai berikut:

- Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling bertransaksi dan membutuhkan.
- Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik.
- Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini.
- Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi publik, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor yang sama dan menyediakan sarana transportasi umum untuk umum.

Sementara itu, hal-hal umum yang membedakan organisasi sektor publik dengan perusahaan di sektor privat secara signifikan adalah sebagai berikut:

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Privat

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Privat
Tujuan Organisasi	Nonprofit motives	Profit motives
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Privat
Tujuan Organisasi	Nonprofit motives	Profit motives
	aset negara, dsb.	aktiva Pembiayaan eksternal: Utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis.	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.
Sistem Akuntansi	Cash Accounting	Accrual Accounting

1. Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimalkan laba, sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik Negara atau milik daerah, upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik.

2. Sumber-sumber pendanaan

Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan pada sektor privat lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

Kebijakan pemilihan struktur modal pada sektor swasta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan pada sektor publik, keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial

3. Pola Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public fund*).

Pola pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan

pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (*cross fungsional*), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.

Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan sektor privat. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat. Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan permintaan konsumen.

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan di diskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor privat

Stakeholder Sektor Publik	Stakeholder Sektor Privat
Stakeholder Eksternal: S Masyarakat pengguna jasa publik. S Masyarakat pembayar pajak. S Perusahaan dan organisasi social	Stakeholder Eksternal: S Bank sebagai kreditor. S Serikat buruh. S Pemerintah.

Stakeholder Sektor Publik	Stakeholder Sektor Privat
ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi. S Bank sebagai kreditor pemerintah. S Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. S Investor asing dan Country Analyst. S Generasi yang akan datang.	S Pemasok. S Distributor. S Pelanggan. S Masyarakat. S Serikat dagang (trade union). S Pasar modal.
Stakeholder Internal: S Lembaga negara (misalnya: Kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb). S Kelompok politik (partai politik). S Manajer publik (Gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD). S Pegawai pemerintah.	Stakeholder Internal: S Manajemen. S Karyawan. S Pemegang saham.

6. Sistem akuntansi

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor privat adalah akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*), sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash accounting*).

2.3. Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)

Setiap organisasi yang bergerak di sektor publik maupun sektor swasta (privat) ingin mencapai tujuannya melalui sumber daya yang tersedia (manusia, modal, bahan baku, dan sebagainya). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari:

- Proses Perencanaan: Strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi (menambah atau mengurangi) aktivitas.
- Proses Pengendalian: Penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa proses perencanaan dapat dilakukan.

Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)

Perencanaan	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Privat)
Disusun oleh bagian perencanaan, organisasi, staf, atau pengelola organisasi	Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut
Disahkan dengan regulasi publik	Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik/pengelola perusahaan
Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik	Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit/laba yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi

Dalam organisasi sektor publik lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan partai politik, proses perencanaannya dilakukan oleh staf dan pengelola yang berwujud dokumen perencanaan. Proses perencanaan itu memberikan kekuatan yang efektif dalam menjalankan peran pengelola. Selain itu, dokumen perencanaan juga merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam pengelolaan organisasi.

Dalam organisasi swasta (privat), proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan di organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan organisasi sektor publik. Pada intinya, terkait dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi untuk meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi, sementara organisasi sektor publik lebih mengutamakan pentingnya layanan kepada publik/masyarakat.

2.4. Penganggaran dalam Sektor Publik dan sektor Bisnis (Privat)

Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.

Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)

Penganggaran	
Sektor Publik	Sektor Privat
Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.	Penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat	Tidak dipublikasikan
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D, legislatif, dewan pengurus	Disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha.

2.5. Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)

Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat (komersial), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya.

Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)

Realisasi Anggaran	
Sektor Publik	Sektor Privat
Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi	Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran	Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk)

- a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mengambil laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

2.6. Standar Akuntansi Keuangan untuk Organisasi Nirlaba

a. Klasifikasi Aktiva Bersih

Nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksa dana setiap harinya. Aktiva bersih dikelompokkan dalam tiga kategori yang masing-masingnya tergantung pada ada atau tidak adanya pembatasan. Aktiva bersih dalam akuntansi nirlaba meliputi aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terkait temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

b. Kontribusi

Kontribusi adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat kepada organisasi atas suatu penyelesaian atau suatu pembatalan utang-utangnya tidak secara timbal balik oleh organisasi lain yang tidak bertindak sebagai pemilik. Transfer meliputi kas atau aktiva lain

seperti bangunan, surat-surat berharga, penggunaan fasilitas, jasa, dan pemberian janji tanpa syarat. Suatu hibah atau wakaf kas atau aktiva lain dengan syarat yang dikembalikan kepada donator jika syarat tidak terpenuhi harus diperlakukan sebagai uang muka yang dapat dikembalikan (kewajiban).

c. Sumbangan yang Terikat & Tidak Terikat

Sumbangan yang terikat dan tidak terikat dihitung pada nilai wajarnya dan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan pada periode diterimanya, atau beban, dan aktiva dalam 3 kelompok aktiva bersih seperti sumbangan yang meningkatkan aktiva bersih tidak terikat, sumbangan yang meningkatkan aktiva bersih, dan sumbangan yang meningkatkan aktiva bersih terikat permanen. Sumbangan yang diberikan diakui sebagai beban dalam satu periode dan diukur pada nilai wajarnya.

Itulah pengertian, ciri-ciri, dan standar akuntansi dalam perusahaan nirlaba. Meski tidak berlandaskan profit atau keuntungan, bisnis nirlaba juga memerlukan laporan keuangan dalam usahanya. Di mana, laporan keuangan ini akan menjadi nilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanan dan layanan lanjutan, serta menjadi sebuah pertanggungjawaban dari pengurus organisasi atas tugas, kewajiban, dan kinerja yang diberikan padanya.

Untuk membuat laporan keuangan nirlaba dengan mudah, cepat, dan aman, Anda dapat memanfaatkan software akuntansi Jurnal. Dengan Jurnal, Anda dapat membuat semua laporan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan bisnis nirlaba Anda.

2.7. Perkembangan Regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintah

• Kebutuhan Regulasi dan Standar di Sektor Publik

Pada zaman sekarang ini, informasi memiliki peranan penting bagi kita semua. Informasi merupakan sarana komunikasi yang efektif antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau antara suatu entitas dengan masyarakat sekitarnya. Dalam seperti ini,

penyediaan informasi yang akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik terjadi jika informasi yang diberikan dapat diterima dan dimengerti secara meluas di masyarakat. Dengan latar belakang apapun, mereka dapat memberikan keputusan dari informasi tersebut. Sehingga, informasi tersebut haruslah memiliki standar yang menyeluruh agar terjadi suatu keseragaman bentuk informasi.

Informasi akuntansi memiliki standar akuntansi yang disebut Prinsip akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Berlaku umum ini maksudnya informasi akuntansi suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapa pun dengan latar belakang apa pun. Sehingga, informasi ini berguna bagi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor lainnya, pemerintah, dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat.

Akuntansi sektor publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biasa. Karena, akuntansi biasa belum mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik.

Ikatan Akuntansi Indonesia sebenarnya telah memasukan standar untuk organisasi nirlaba di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini tercantum pada PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Namun, standar ini belum mengakomodasi praktik-praktik lembaga pemerintahan ataupun organisasi nirlaba yang dimilikinya. Karena itu, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar akuntansi sektor publik juga telah diatur secara internasional. Organisasi yang merancang standar ini adalah *International Federation of Accountants* (IFAC) (Federasi Akuntan Internasional). Mereka membuat suatu standar akuntansi sektor publik yang disebut *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). Standar ini menjadi pedoman bagi perancangan standar akuntansi pemerintahan di setiap Negara di dunia.

- **Perkembangan Peraturan Perundangan di Sektor Publik:**

Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan.

Otonomi daerah berlaku akibat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. UU ini mulai berlaku sejak tahun 2001.

Lalu, pemerintah merasa UU Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU baru, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang di atas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Perubahan undang-undang tersebut merupakan salah satu hal yang signifikan dalam perkembangan otonomi daerah. Perubahan itu sendiri dilandasi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.
2. Adanya semangat tata kelola yang baik (*good governance*).
3. Adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan dan pendanaan (*money follows function*) yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah.
4. Perlunya penyelarasan dengan paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Presiden Republik Indonesia, 1999b)

Peraturan perundangan terus bergerak dinamis khususnya Peraturan Pemerintahan (PP) sebagai turunan berbagai undang-undang di atas, antara lain:

1. PP Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
4. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
5. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
6. PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.
7. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2.8. Contoh Komparasi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Bisnis

Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah) untuk jangka waktu 20 tahun yang ditetapkan dengan perda.
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah) untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan perda.
3. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat.

Perencanaan	
Sektor publik	Sektor bisnis (swasta)
Disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi.	Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut.
Disahkan dengan regulasi publik.	Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik/pengelola perusahaan.
Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik.	Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit/laba yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi.

Dalam organisasi swasta, proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan di organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan organisasi sector publik. Pada intinya, terkait dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi untuk meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi, sementara organisasi sector publik lebih mengutamakan pentingnya layanan kepada publik/masyarakat.

2.9. Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Di dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.

Penganggaran	
Sektor publik	Sektor bisnis (swasta)
Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.	Penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha.
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat.	Tidak dipublikasikan.
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D legislatif dewan pengurus.	Disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha.

2.10. Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis

Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor bisnis (swasta), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor publik kualitas dicapai untuk mencapai tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya.

Realisasi anggaran	
Sektor publik	Sektor bisnis (swasta)
Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi.	Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran.	Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk).

2.11. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sifat barang ini tidak eksklusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sementara itu barang swasta adalah barang yang spesifik yang dimiliki oleh swasta dan bersifat eksklusif serta hanya dapat dinikmati oleh orang yang mampu membelinya. Karena harga yang disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan sang penjual.

Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:

- mekanisme pasar (*market mechanism*)
- mekanisme birokrasi (*bureaucratic mechanism*)

Pengadaan barang dan jasa adalah usaha yang diperlukan oleh organisasi sektor publik yang meliputi:

- pengadaan barang
- jasa pemborong
- jasa konsultasi, dan
- jasa lainnya

Perbedaan pengadaan barang dan jasa di sektor publik dan swasta terletak pada tujuannya. Pada organisasi sektor publik, pengadaan barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas, sedangkan swasta diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi.

Pengadaan barang dan jasa	
Sektor publik	Sektor bisnis (swasta)
Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah	Barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta
Sifatnya tidak eksklusif	Sifatnya eksklusif
Pada umumnya barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat dalam skala luas.	Barang dan jasa hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya.
Tujuan pengadaan barang dan jasa publik adalah dipertunjukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas.	Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi.

2.12. Pelaporan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Asumsi UU No. 17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, model pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan diterapkan sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru.

Pada Governmental Accounting Standards Board (GASB) mengeluarkan GASB statement No. 34 "*Basic Financial Statement and Management's Discussion and Analysis for State and local Government,*" dimana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu Negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara.

Menurut Likierman dan Taylor ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta yaitu:

- a) Laporan keuangan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik.
- b) Laporan keuangan sector swasta sangat terikat oleh aturan dan kriteria kecurangan.
- c) Pertanggungjawaban laporan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah adalah kepada DPR/D dan masyarakat luas, sementara yayasan dan LSM kepada donor, dewan pengampu, serta masyarakat luas.
- d) Kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan para pemegang saham dan kreditur.
- e) Laporan organisasi sektor publik harus ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas publik.
- f) Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap pada tingkat organisasi secara keseluruhan.
- g) Laporan organisasi sektor publik seperti unit pemerintahan dan pemerintahan secara keseluruhan dijadikan sebagai dasar analisis atas prospek pemerintahan, sementara di LSM dan yayasan dijadikan sebagai dasar analisis atas prospek organisasi.

- h) Laporan unit pemerintah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.

Sementara itu, berbagai persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta juga dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kriteria validitas dan reliabilitas dokumen sumber.
2. Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas publik.
3. Siklus akuntansi dapat diperbandingkan.
4. Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan organisasi independen.
5. Laporan keuangan pemerintahan dan organisasi swasta bisa diakui sebagai dasar hukum.

2.13. Audit dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis (swasta). Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Sementara itu, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari Audit Keuangan (*Financial Audit*), Audit Kinerja (*Performance Audit*), dan Audit untuk Tujuan Khusus (*Special Audit*). Pada bagian selanjutnya, akan dibahas mengenai jenis-jenis audit sektor publik.

Realisasi Anggaran	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sector pemerintahan daerah (Pemda), BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan	Perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.

Realisasi Anggaran	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
aset perusahaan negara, partai politik, yasan, LSM, dan organisasi social lainnya.	

2.14. Pertanggungjawaban dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Pertanggungjawaban	
Sektor publik	Sektor bisnis (swasta)
Pertanggungjawaban merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi sektor publik.	Pertanggungjawaban merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi bisnis (swasta).
Pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat, konstituen, dan dewan pengampu di LSM atau yayasan.	Pertanggungjawaban dilakukan kepada stakeholders dan pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis (swasta).

2.15. Standar Audit Sektor Publik

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang diterima oleh auditor.

2.16. Fungsi Standar Audit Sektor Publik

Standar akan menjadi pedoman dan pegangan akuntan publik, sehingga kewajiban dan larangan akuntan publik dapat dipenuhi dengan baik. Standar audit berfungsi sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian. Standar audit juga dapat mendorong akuntan publik menggunakan kemahiran jabatannya (*due professional care*), menjaga kerahasiaan informasi/

data yang diperoleh, melakukan pengendalian mutu, dan bersikap profesional.

- **Objek Audit Sektor Publik**
 - a. Organisasi/lembaga sector komersial, yaitu bertujuan untuk mencari laba.
 - b. Organisasi/lembaga sector publik, yaitu yang bertujuan murni nirlaba.
 - c. Kuasi sector publik, yaitu unit yang tidak semata-mata mencari laba.
- **Persiapan Pelaksanaan Standar Audit Sector Publik**
- **Persiapan Penugasan**
 - a. Pembentukan Tim Audit
 - b. Pre-Audit Surveys dan Pelatihan
 - c. Mengumpulkan undang-undang dan peraturan yang relevan
 - d. Persiapan program audit
 - e. Menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit.
- **Proses Audit**
 - a. Merencanakan audit untuk memperoleh informasi yang relevan.
 - b. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal auditan.
 - c. Menguji asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan.
 - d. Menguji ketaatan pada undang-undang atau peraturan yang mengikat.

Perbedaan Organisasi Publik Dan Organisasi Privat

A. Organisasi Publik

- **Pengertian**

Istilah publik berasal dari bahasa Latin "*of people*" (yang berkenaan dengan masyarakat). Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum.

Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.

- **Lingkungan Organisasi**

Lingkungan dalam organisasi publik:

Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas. Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.

Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.

B. Organisasi Privat

- **Pengertian**

Istilah privat berasal dari bahasa Latin "*set apart*" (yang terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan pada hal - hal yang 'terpisah' dari masyarakat secara umum. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar.

- **Lingkungan Organisasi**

Lingkungan dalam organisasi privat:

Lingkungan otorisasi, misal dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.

Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitikberatkan proses pengambilan keputusan pada naik-

turunnya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat.

Tabel perbandingan organisasi publik dan privat secara umum

No		Organisasi Publik	Organisasi Privat
1.	Tujuan	laba	non laba
2.	Produk yang dihasilkan	<i>Publics goods</i>	<i>Privat goods</i>
3.	Cara pengambilan keputusan	Demokratis	Strategis bisnis
4.	Ukuran kinerja	<i>Social welfare</i>	<i>Efisiensi</i>
5.	Misi organisasi	“melakukan kebaikan”	“untung rugi”

Ciri – Ciri Organisasi Publik dan Privat

Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber mengenai perbedaan organisasi publik dan privat.

1. Organisasi Publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
2. Organisasi Publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.
3. Organisasi Publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4. Organisasi Publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5. Organisasi Publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6. Organisasi Publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
7. Organisasi Publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
8. Organisasi Publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
9. Organisasi Publik beroperasi untuk kepentingan publik
10. Organisasi Publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan.

Tipe - Tipe Organisasi Publik

		Tujuan	
		Jelas	Tidak Jelas
Hubungan kausal	Pasti Tidak Pasti	A: Efisiensi Ekonomi B: Kriteria Judgmental	C: Legitimasi Kelembagaan D: Legitimasi Kelembagaan

Menurut Sorensen (dalam Kooiman and Eliassen, 1993), organisasi publik terbagi dalam empat kategori.

Organisasi publik kategori A adalah organisasi-organisasi publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi *public goods* yang ditugaskan kepadanya. Tipe ini biasanya kita temukan pada perusahaan-perusahaan milik negara.

Organisasi publik kategori B adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan sebab-akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Untuk organisasi publik semacam ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran kinerja yang semata-mata bersifat ekonomis. Biasanya penilaian kinerja dilakukan melalui pendapat para ahli.

Organisasi publik kategori C adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan, tetapi hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat ditentukan secara pasti.

Organisasi publik kategori D adalah organisasi-organisasi publik dimana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Di sini tercakup badan-badan pemerintah seperti departemen-departemen, kepolisian, tentara, dan lain-lain. Untuk kedua tipe ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran ekonomis maupun judgmental, melainkan legitimasi kelembagaan.

Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Untuk menjawab kelemahan-kelemahan organisasi publik, dewasa ini setidaknya ada dua paradigma yang bersaing untuk menggantikan tipe organisasi publik lama, atau sering juga disebut *Old Public Administration* (OPA). Pertama adalah model organisasi publik yang disebut *New Public Management* (NPM), yaitu kelompok pemikiran yang menitikberatkan pada perbaikan manajerial dalam tubuh pemerintahan dengan meminjam gagasan-gagasan dari sektor privat yang dipandang lebih unggul dalam menciptakan pelayanan berbasis konsumen. Kedua adalah paradigma organisasi publik yang disebut *New Public Service* (NPS) yang mencoba menahan laju 'penyusupan' gagasan-gagasan manajerial ke dalam tubuh organisasi publik, yang menurut mereka sering kali dilakukan secara berlebihan.

Tiga perspektif Administrasi Publik

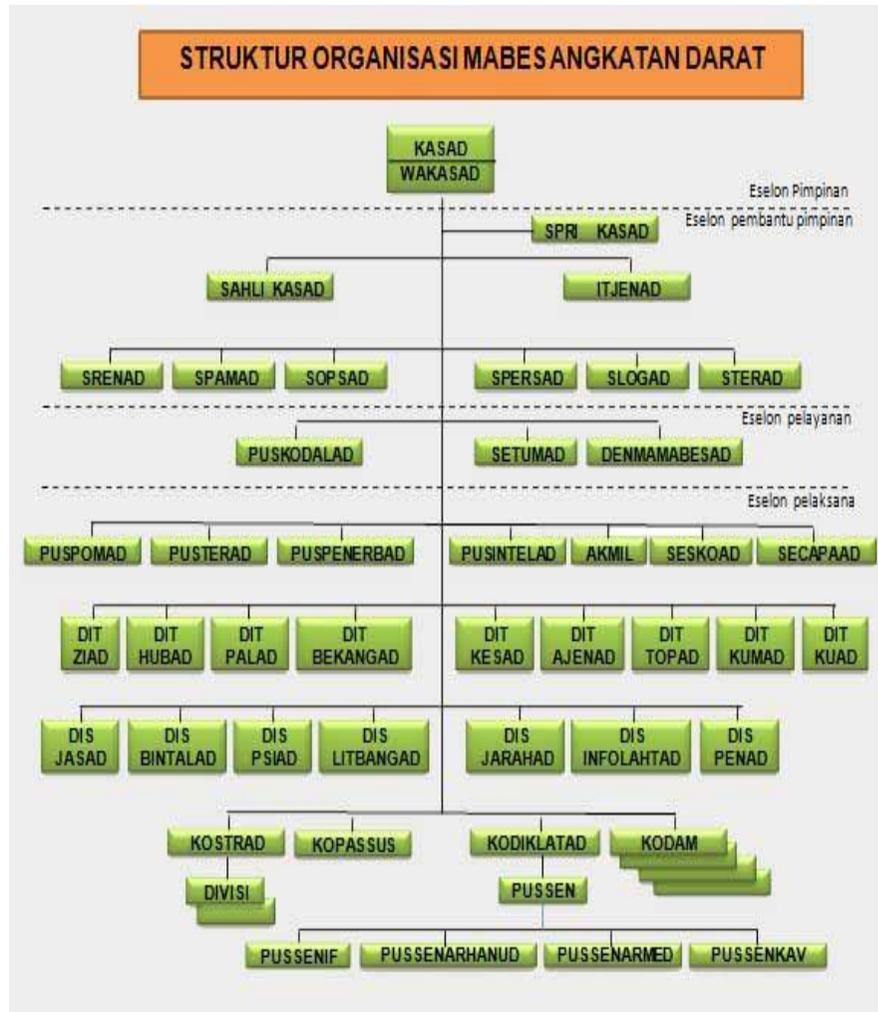
No	Elemen	OPA	NPM	NPS
1.	Dasar Epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi, baragam pendekatan
2.	Konsep public Interest	Sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
3.	Siapa yang dilayani	Clients & constituents	Pelanggan	Warga negara
4.	Peran Pemerintah	Mengayuh	Mengarahkan	Melayani
5.	Rasionalitas & Model Perilaku Manusia	Rasionalitas sinoptis, manusia administratif	Rasionalitas teknis dan ekonomis, "economicaman", pengambil keputusan yang self-interested	Rasionalitas strategis atau formal, uji rasionalitas berganda (politis, ekonomis, dan organisasional)
6.	Akuntabilitas	Menurut hierarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan customers	Banyak dimensi; akuntabilitas pada nilai, hukum, komunitas,

No	Elemen	OPA	NPM	NPS
				norma politik, profesionalisme, kepentingan citizen
7.	Diskresi Administratif	Diskresi terbatas pada petugas administratif	Berjangkauan luas untuk mencapai sasaran entrepreneurial	Diskresi diperlukan tetapi bertanggung jawab dan bila perlu terpaksa
8.	Struktur Organisasi	Organisasi birokratis, kewenangan top-down	Organisasi publik terdesentralisasi	Struktur kolaboratif antara kepemimpinan eksternal dan internal
9.	Mekanisme pencapaian sasaran kebijakan	Melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang ada	Melalui pembentukan mekanisme dan struktur insentif	Membangun koalisi antara agensi publik, non-profit, dan swasta
10.	Dasar motivasi perangkat dan administrator	Gaji dan tunjangan disertai perlindungan bagi pegawai negeri	Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah	Pelayanan kepada masyarakat, keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat

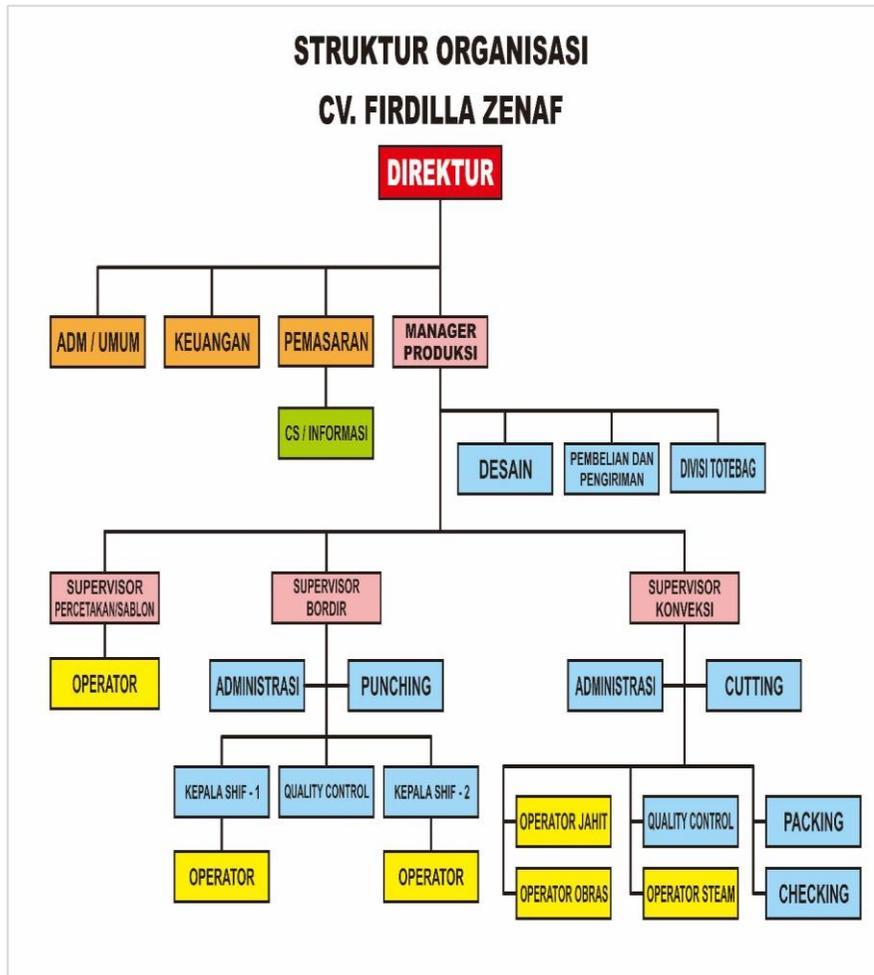
Secara garis besar, inilah pokok-pokok perdebatan para ahli berkenaan dengan perbandingan antara administrasi publik dan administrasi privat. OPA adalah pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada standar-standar administrasi publik yang secara tradisional telah dikembangkan sejak abad pertengahan. Sementara itu NPM mencoba memasukkan standar-standar administrasi privat ke tubuh organisasi publik, dengan harapan akan menghasilkan kinerja yang sama baiknya dengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS memberi semacam 'jalan tengah' yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas organisasi publik sembari berusaha memperbaiki kinerja administrasi publik secara pragmatis.

2.17. Contoh Organisasi Sektor Publik Dan Swasta (Privat)

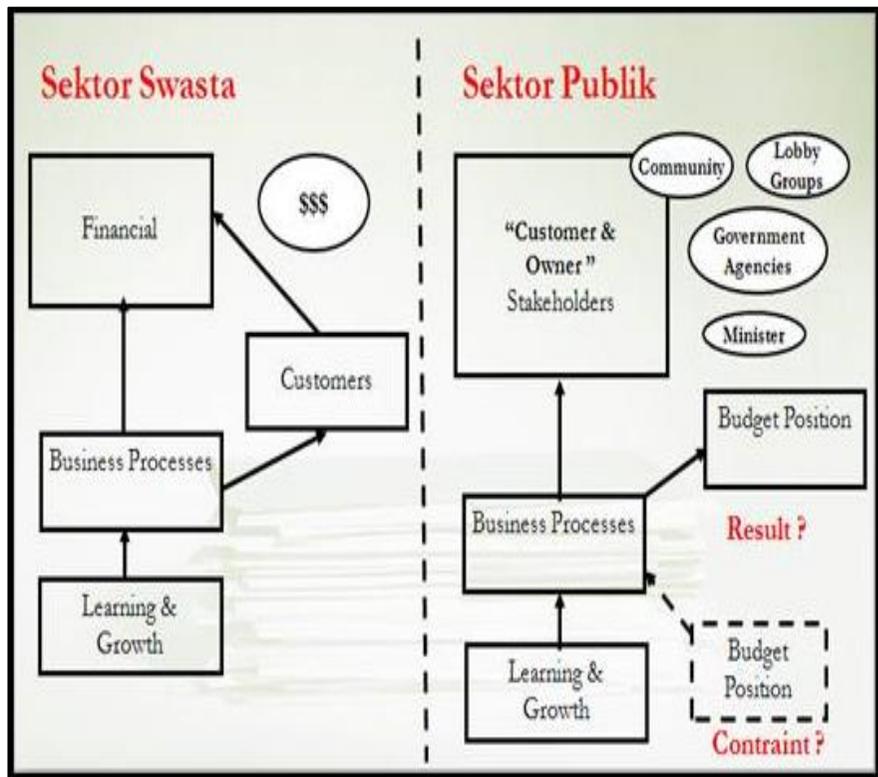
- Organisasi Sektor Publik



- Organisasi Sektor Swasta



- Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta



2.18. Contoh Anggaran Sektor Publik dan Sektor Swasta (Privat)

- Anggaran Sektor Publik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA					
LAPORAN REALISASI APBN					
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011					
(Dalam Rupiah)					
Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)			TA 2011 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,49	873.873.892.399.381
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	908.293.241.511.000	930.861.639.509.438	96,13	819.752.476.342.423
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	47.944.100.000.000	49.656.293.809.881	103,57	54.121.466.056.958
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	341.142.610.103.000	351.804.746.686.862	103,13	331.471.821.098.730
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	217.158.876.693.000	225.843.973.463.751	104,00	213.823.348.552.827
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	30.776.336.250.000	30.797.972.717.670	100,07	28.183.973.126.600
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	72.789.374.473.000	73.458.504.524.407	100,91	69.360.502.832.532
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	20.408.022.687.000	21.704.295.061.034	106,35	20.103.995.586.771
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	825.091.586.000	5.786.749.186.777	701,35	5.253.339.861.304
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.358.205.043.200.000	1.338.109.629.172.958	98,52	1.210.599.653.359.415
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.069.534.444.947.000	1.010.558.236.531.814	94,49	883.721.886.196.519
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	212.971.607.708.622	197.863.595.816.235	92,91	175.737.918.419.015
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	160.031.270.543.988	140.894.875.397.761	88,04	124.639.479.502.304
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	182.621.948.581.508	145.104.148.492.853	79,46	117.854.532.071.332
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	117.785.423.800.000	100.515.994.274.844	85,34	93.261.919.810.886
5. Subsidi	B.2.2.1.5	245.076.318.862.000	346.420.404.182.332	141,36	295.358.229.636.324
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.790.936.805.000	75.079.293.554	4,19	300.108.798.353
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	80.716.444.343.429	75.621.057.138.995	93,69	71.104.328.162.347
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	68.540.494.302.453	4.073.111.935.240	5,94	5.465.369.795.958
II. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	478.775.933.233.000	480.645.074.235.761	100,39	411.324.764.631.790
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	408.352.055.705.000	411.293.124.979.761	100,72	347.246.213.954.316
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	108.421.689.502.000	111.537.202.820.761	102,87	96.908.991.981.316
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	273.814.438.203.000	273.814.438.203.000	100,00	225.533.712.048.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	26.115.948.000.000	25.941.483.856.000	99,33	24.803.509.925.000

- **Anggaran Sektor Swasta**

Bahan Ajar Anggaran
***** D ara Kusumawati *****

1. Anggaran Penjualan

Perusahaan Dagang Olala
Anggaran Penjualan
Triwulan II 2005

Keterangan	April	Mei	Juni	Juli
Penjualan 2004	10.000 kg	10.500 kg	11.025 kg	11.576 kg
Tambahan 5%	500 kg	525 kg	551 kg	579 kg
Penjualan	10.500 kg	11.025 kg	11.576 kg	12.155 kg
Harga jual / kg	Rp 25	Rp 25	Rp 25	Rp 25
Penjualan	Rp262.500	Rp275.625	Rp289.400	Rp303.875

2. Anggaran Pembelian dan Hutang dagang

Perusahaan Dagang Olala
Anggaran Pembelian dan Hutang dagang
Triwulan II 2005

Keterangan	April	Mei	Juni
Penjualan bulan yang akan datang (Kg)	11.025	11.576	12.155
Persentase persediaan akhir	x 80%	80%	80%
Persediaan Barang dagangan akhir	8.820	9.260,8	9.724
Penjualan bulan ini (dalam Kg)	10.500	11.025	11.576
Barang siap dijual	19.320	20.285,8	21.300
Persediaan barang dagangan awal	8.400	8.820	9.260,8
Pembelian (dalam unit)	10.920	11.465,8	12.039,2
Harga pokok per Kg	x Rp 15	Rp 15	Rp 15
Pembelian	Rp 163.800	Rp 171.987	Rp 180.588
Utang dagang	Rp 163.800	Rp 171.987	Rp 180.588
Pembayaran Utang dagang	Rp 156.000	Rp 163.800	Rp 171.987
HPP	Rp 157.500	Rp 165.375	Rp 173.640
Persediaan akhir barang dagangan	Rp 132.300	Rp 138.912	Rp 145.860

3. anggaran biaya penjualan

Perusahaan Dagang Olala
Anggaran Biaya Penjualan
Triwulan II 2005

Keterangan	April	Mei	Juni	Setriwulan
Penjualan	Rp 262,500	Rp 275,625	Rp 289,400	Rp 827,525
Persentase Komisi	x 12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
Komisi Penjualan	Rp 32,812.50	Rp 34,453.13	Rp 36,175.00	Rp 103,440.63
Gaji Penjualan	+ Rp 3,500.00	Rp 4,000.00	Rp 4,000.00	Rp 11,500.00
Biaya Penjualan	Rp 36,312.50	Rp 38,453.13	Rp 40,175.00	Rp 114,940.63

SOAL LATIHAN

- a. Sebutkan perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta!
- b. Sebutkan dan jelaskan perbedaan perencanaan sektor publik dan sektor swasta!
- c. Sebutkan standard dan regulasi sektor publik!
- d. Sebutkan dan jelaskan perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta!
- e. Sebutkan perbedaan audit sektor publik dan swasta!

BAB 3

KEUANGAN NEGARA & PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami definisi keuangan negara
2. Mampu menyebutkan Jenis-jenis penganggaran
3. Mampu mengetahui dan memahami siklus anggaran
4. Mampu mengetahui dan memahami siklus APBN dan APBD

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab I Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

3.1. Keuangan Negara

Hak-hak negara seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 tersebut antara lain adalah hak menciptakan uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, hak memaksa warga negara. Sedangkan kewajiban negara antara lain adalah menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat.

Dengan adanya tugas negara yang diselenggarakan demi kepentingan masyarakat, maka masyarakat secara tidak langsung dibebani biaya penyelenggaraan tugas negara tersebut. Masyarakat dikenakan berbagai iuran berupa pajak-pajak dalam berbagai bentuk, bea dan cukai, retribusi dan lain sebagainya.

Sementara mengenai dasar hukum dari Keuangan Negara itu sendiri diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengenai Hal Keuangan, Pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23 UUD 1945 ayat (1) mengatakan mengenai Anggaran. Isi dari anggaran negara itu sendiri antara lain terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerimaan dalam negeri, seperti Pajak perorangan, Pajak kekayaan, Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA).
- b) Pajak tak langsung, seperti Pajak penjualan impor, Cukai, Bea masuk, Bea materai.
- c) Penerimaan bukan pajak, seperti Penerimaan jasa yang diberikan pada masyarakat, Penerimaan pengadilan, Sisa anggaran. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945)

Keuangan negara itu sendiri tidak saja berupa uang negara, tapi seluruh kekayaan negara termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam penguasaan dan pengurusan pejabat-pejabat dan atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun berada dalam penguasaan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah,

perusahaan-perusahaan negara dan usaha-usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Keuangan Negara juga meliputi antara lain:

- a) Uang negara dalam bentuk tunai.
- b) Uang negara dalam bentuk surat-surat berharga.
- c) Hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
- d) Utang dan piutang.
- e) Pengurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan negara.

Adanya hak dan kewajiban tersebut membawa akibat negara harus menyusun rencana pemasukan maupun pengeluaran uang yang dituangkan dalam Anggaran Negara yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kekayaan Negara yang dipisahkan, misal pada perusahaan-perusahaan negara.

3.2. Jenis-jenis Penganggaran

Penganggaran di sektor pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang serta tidak dapat dilepaskan dari sektor politis. Kompleksitas disebabkan karena belum adanya kesempatan yang dapat diterima semua pihak tentang bagaimana pengalokasian sumber dana pemerintah secara tertib.

Ketidak kesepakatan tersebut antara lain disebabkan masalah politis, adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait maka alokasi anggaran sekarang didasarkan kepada target kinerja.

Perubahan pendekatan ini tentunya menuntut adanya perubahan paradigma dari aparat pemerintah baik yang pusat maupun daerah, karena setiap dana yang dialokasikan dalam APBN maupun APBD harus dapat terukur kinerjanya, dengan kata lain tidak

ada alokasi anggaran apabila tidak jelas kinerjanya. Perubahan paradigma di dalam penyusunan APBN/APBD ini dilatarbelakangi hal-hal berikut:

- a) Meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif.
- b) Berlakunya Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c) Adanya PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- d) Sistem prosedur, format dan struktur APBN/APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan yang sistematis, terukur dan komprehensif.

Terdapat berbagai definisi tentang arti penganggaran, namun secara umum penganggaran (*budgeting*) dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumber-sumber daya keuangan. Sedangkan anggaran (*budget*) dirumuskan secara singkat oleh Brimson and Antos (1994) sebagai rencana yang dituangkan dalam angka- angka finansial. Berkaitan dengan organisasi pemerintahan, penganggaran berarti proses pengalokasian sumber daya keuangan negara yang terbatas untuk digunakan membiayai pengeluaran oleh unit pemerintahan (kementerian dan lembaga sebagai pengguna anggaran).

Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Terdapat lima jenis sistem penganggaran yang diterima umum yaitu: (Halim, 2007)

a. *Line Item Budgeting*

Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Merupakan pendekatan paling tua dan banyak

mengandung kelemahan antara lain: Berorientasi kepada input, dasar alokasi tidak jelas, tidak fleksibel dan berorientasi jangka pendek.

Konsep ini akhirnya ditinggalkan dan digantikan oleh konsep- konsep yang muncul kemudian seperti anggaran program (*program budgeting*), sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran (*Planing, Programming Budgeting System*) dan penganggaran dasar nol (*Zero Based Budgeting*)

b. *Incremental Budgeting*

Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka dipos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya

c. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah.

Dalam *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, perkoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan dan pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang.

Planning Programming Budgeting System (PPBS) berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program dan sub-sub program serta berbagai proyek.

d. *Zero Bases Budgeting (ZBB)*

Zero Bases Budgeting (ZBB) adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Zero Bases

Budgeting (ZBB) mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan/pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu.

Namun semua konsep-konsep tersebut di atas, selain menawarkan kekuatannya juga akhirnya tenggelam oleh berbagai kelemahannya. Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan manajemen publik baru, yang berorientasi kepada hasil, pelayanan, inovasi, fleksibilitas dan akuntabilitas maka banyak negara mulai beralih ke penganggaran kinerja (*performance Budgeting*).

e. Performance Budgeting (penganggaran kinerja)

Performance Budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (Workload) dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Anggaran kinerja menekankan keterkaitan antara anggaran dengan hasil kerja.

3.3. Siklus Anggaran

Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1) Penetapan Prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terkait

Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran terkait. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait.

2) Penetapan Dokumen Standar Harga

Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa).

3) Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahapan ini akan disebarakan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana

kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

4) Rekapitulasi kertas kerja

Tahapan selanjutnya proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

5) Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja

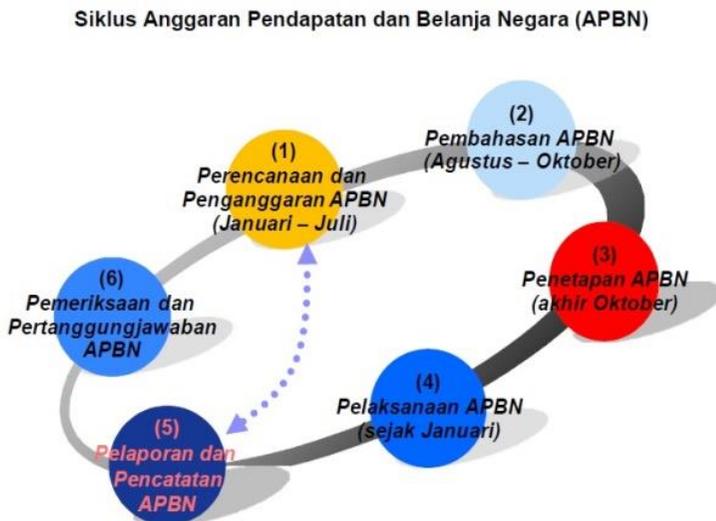
Setelah melakukan tahap rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja.

6) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran.

3.4. Siklus APBN dan APBD

Siklus APBN dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) Fiscal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran.

a) Tahap perencanaan dimulai dari:

- Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
- Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
- Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya
- Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan;
- K/L menyusun rencana kerja (Renja);

- Pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
- Rancangan awal RKP disempurnakan;
- RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR;
- RKP ditetapkan.

b) Tahap penganggaran dimulai dari:

- Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
- Penetapan pagu indikatif
- Penetapan pagu anggaran K/L;
- Penyusunan Rencana Kerja Dan anggaran K/L (RKA-K/L);
- Penelaahan rka-k/l sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;
- Penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

2. Penetapan/Persetujuan APBN

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

3. Pelaksanaan APBN

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari–31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014–31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L

mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

4. Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

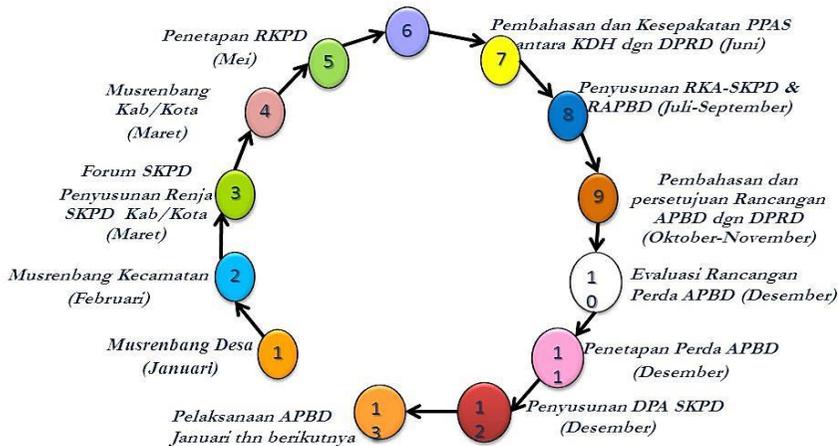
5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN $t+1$), sekitar bulan Januari – Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Siklus APBD dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah



SOAL LATIHAN

1. Jelaskan definisi keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003!
2. Sebutkan Jenis-jenis penganggaran dan jelaskan!
3. Sebutkan dan jelaskan siklus APBN!
4. Sebutkan siklus APBD!

BAB 4

AKUNTANSI PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menyebutkan pemakai laporan keuangan sektor publik
2. Mampu menyebutkan dan menjelaskan hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik
3. Mampu mengetahui dan memahami tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik
4. Mampu memahami Akuntansi manajemen sektor publik.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

4.1. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

Langenderfer (1973) (dalam Glynn, 1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu: (1) sifat informasi yang diberikan; (2) kepada siapa informasi tersebut

diberikan ; dan (3) tujuan informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut Langenderfer menyatakan bahwa:

Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Langenderfer, 1973, p.50).

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan.

Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya *true and fair presentation*.

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sektor publik telah dibahas pada bab 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik tersebut.

Drebin, Chan and Ferguson, Lorna, (1981) mengidentifikasi terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah:

1. Pembayar pajak (*taxpayers*)
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*)

3. Investor
4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*)
5. Karyawan/pegawai
6. Pemasok (*vendor*)
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih (*voters*)
10. Badan pengawas (*oversight bodies*)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislatif dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector publik menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Lembaga pemerintah (*governing bodies*)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (*resource providers*)
4. Badan pengawas (*oversight bodies*)
5. Konstituen

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang disebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, Hanley (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (*elected members*)
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak
3. Pelanggan atau klien
4. Karyawan/pegawai
5. Pelanggan dan pemasok
6. Pemerintah
7. Pesaing (*competitors*)
8. Regulator
9. Pemberi pinjaman (*lenders*)
10. Donor dan sponsor
11. Investor atau partner bisnis
12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Anessi-pessina (2018):

1. Masyarakat pengguna jasa publik
2. Masyarakat pembayar pajak
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah
5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.
6. Investor asing dan *Country Analyst*
7. Generasi yang akan datang
8. Lembaga Negara.

4.2. Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:
 - Mengetahui kebijakan pemerintah
 - Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
 - Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

- b. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
- c. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listen to*).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability & stewardship*).

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah

terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

4.3. Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
- b) Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (*accountability and restrospective reporting*).
- c) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*).
- d) Kelangsungan organisasi (*viability*).
- e) Hubungan masyarakat (*public relation*).
- f) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

- Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut *statement of financial accounting concepts no 4 (sfac 4)*.

- Bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional.
- Untuk menilai pelayanan.
- Menilai kinerja manajer organisasi.
- Memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan.
- Informasi kinerja selama satu periode.
- Informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas.
- Memberi penjelasan dan interpretasi.

4.4. Akuntansi Manajemen di Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:

1. Perencanaan strategik
2. Pemberian informasi biaya
3. Penilaian investasi
4. Penganggaran
5. Penentuan biaya pelayanan (*cost of service*) dan penentuan tarif pelayanan (*charging for service*)
6. Penilaian kinerja

Ad. 1. Perencanaan Strategik

Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tsb diseleksi dan dipilih sesuai dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tsb manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang handal dan akurat, relevan untuk menghitung berapa besarnya biaya program, aktivitas atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan yaitu: efisiensi biaya, kualitas produk dan pelayanan (*cash, quality and service*).

Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern, yaitu dengan menerapkan teknis akuntansi manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Terdapat perbedaan antara sektor swasta dan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan, hal ini disebabkan bahwa sebagian besar biaya pelayanan pada sektor swasta cenderung merupakan *engineered cost* yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan *discretionary cost* yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan sektor publik merupakan *intangible output* yang sulit diukur, maka peran manajer publik sangat penting dalam pengendalian biaya

Ad. 2. Pemberian Informasi Biaya

Biaya (*cost*) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

- Biaya input, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku
- Biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada

organisasi sektor publik output dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Contoh pada perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang

- Biaya proses, biaya ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, biaya dapat diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas dsb.

Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu *cost finding*, *cost recording*, *cost analyzing*, *strategic cost reduction* dan *cost reporting*.

- *Cost finding*,
Pada tahap ini pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/ jasa layanan
- *Cost recording*,
Pada tahap ini yang dilakukan adalah kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi
- *Cost analyzing*,
Pada tahap ini dilakukan analisis biaya yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (*cost driver*) agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.
- *Strategic cost reduction*
Tahap ini adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai *value for money*. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Berjangka panjang. Manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka panjang yang membentuk budaya organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama
 - 2) Berdasarkan budaya perbaikan berkelanjutan dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat
 - 3) Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya

- 4) Keseriusan manajemen puncak (*top manager*) merupakan penentu efektifitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan *tone from the top*
- *Cost reporting.*
Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Informasi manajemen hendaknya dapat mendeteksi adanya pemborosan yang masih berpotensi untuk diefisiensikan serta mencari metode atau teknik untuk penghematan biaya. Akuntansi manajemen hendaknya dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip *value for money* dan *public accountability* organisasi sektor publik

Ad.3. Penilaian Investasi

Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan oleh akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian serta sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan.

Penilaian investasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (*cost benefit analysis*). Dalam praktik ini sulit dilakukan karena biaya yang diukur tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi biaya sosial dan manfaat sosial yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Kemudian untuk memudahkan digunakan analisis efektifitas biaya

(*cost effectiveness analysis*), yaitu menekankan seberapa besar dampak yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu

Ad. 4. Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi dan stabilisasi maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, jika tidak akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat karena hanya akan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Ad. 5. Penentuan *Cost of Service* dan *Charging for Service*

Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan secara cepat, berkualitas dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin meningkat dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula.

Penentuan biaya pelayanan (*Cost of Service*) dan penentuan tarif (*Charging for Service*) merupakan satu rangkaian dimana keduanya membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh pemerintah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib aman dan nyaman serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi ini pemerintah dapat menentukan berapa besarnya biaya tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada para pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun tsb, demikian juga untuk PDAM dsb.

Ad. 6. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian, ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Disini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas.

4.5. Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan di Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen publik sangat penting atau sakral karena memberikan informasi akuntansi yang kredibel, relevan, handal dan dapat dipercaya kepada pihak manajer. Sehingga dengan pencapaian tujuan organisasi, para manajer dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan perencanaan organisasi dengan baik.

Pada dasarnya prinsip-prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan sektor swasta. Akan tetapi sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan sektor swasta, sehingga teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak bisa digunakan secara langsung tanpa modifikasi. Fokus akuntansi manajemen sektor publik adalah penyediaan informasi guna efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Sedangkan, pengertian sektor publik telah dijelaskan di awal dalam artikel Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik.

Akuntansi keuangan atau *general accounting* merupakan salah satu dari jenis akuntansi, yang menyajikan pencatatan laporan dan transaksi keuangan guna diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan. Pihak-pihak tersebut mencakup pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal merupakan pihak-pihak di dalam perusahaan yang berkaitan langsung, seperti misalnya bagian keuangan serta para pemimpin perusahaan. Sedangkan pihak eksternal antara lain para pemegang saham, calon *investor*, para

kreditur (pihak yang akan memberikan pinjaman dana), para *supplier* (pihak yang menyediakan hal atau barang yang dibutuhkan perusahaan), pemerintah, serta masyarakat luas. Adanya pihak-pihak tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan akuntansi keuangan dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Dengan tersajinya laporan keuangan yang baik, maka kredibilitas dan *image* perusahaan pun akan baik di mata pihak-pihak tersebut.

Akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif dan digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang terkait dengan informasi pada pihak intern. Sedangkan, pengertian akuntansi keuangan terkait pada pemberian laporan dan informasi yang bersifat historis dan retrospektif kepada pihak ekstern. Fungsi sistem informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi sifatnya rutin, informasi kuantitatif, dan informasi disampaikan melalui saluran formal.

4.6. Contoh Kasus

Deskripsi Kasus

Seringnya pemadaman listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat geram sejumlah masyarakat. Bila dikaji secara ekonomi, apa yang telah dilakukan PLN tersebut sedikit demi sedikit telah menyebabkan kerugian banyak pihak, terutama sektor usaha. Menurut pakar ekonomi Deliarnov, jika PLN terus melakukan pemadaman bergilir, maka pertumbuhan ekonomi kita pun akan terhambat. Untuk mengubah kebiasaan buruk itu, diperlukan reformasi di tubuh PLN. Kunci utama untuk reformasi itu berada pada pemerintah pusat. Ia juga mengatakan "Pemerintah harus berani mereformasi PLN. Pemerintah juga mesti bertindak tegas untuk menegur PLN. Kalau bisa datangkan BPK atau KPK untuk mengaudit apakah benar penyaluran dana di PLN tersebut, karena setiap kali ada

pemadaman alasannya ada mesin yang rusak atau daya tidak cukup karena besarnya beban pemakaian.”

Solusi

Seperti yang sudah kita ketahui, jika masyarakat terlambat membayar maka pihak PLN akan memberikan sanksi kepada masyarakat tersebut dengan memutus aliran listrik untuk sementara waktu. Namun jika PLN yang melakukan pemadaman baik secara bergilir maupun mendadak, pihak PLN tidak bertanggungjawab baik secara moril maupun material kepada masyarakat yang dirugikan. Sudah seharusnya pihak PLN membenahi diri agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Solusi yang diperlukan menghadapi situasi ini adalah perlunya perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern PLN, perlunya dilakukan pengawasan dan perawatan (pemeliharaan) yang berkala akan gardu-gardu listrik serta sistem, dan pengoperasian yang dimiliki PLN. Selain itu juga diperlukan realisasi pembangkit listrik lainnya, seperti yang saat ini sedang direncanakan oleh pemerintah. Otonomi bagi daerah untuk mengatur dan mengelola PLN yang berada di daerahnya, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kinerja PLN dengan cara memberikan kepercayaan dan modal ke pemerintah daerah. Pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah juga perlu dilakukan sehingga penyelewengan akan dana tersebut dapat dicegah. Selain itu juga perlu dilakukan audit secara berkala oleh BPK atau KPK sehingga kecurangan-kecurangan, serta masalah-masalah dapat diminimalisasi.

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan pemakai laporan keuangan sektor publik!
2. Sebutkan dan jelaskan hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik!
3. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sector
4. Jelaskan peran Akuntansi manajemen di sektor publik.

BAB 5

TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami fokus pengukuran
2. Mampu memahami sistem pencatatan dan basis akuntansi
3. Mampu memahami dan menjelaskan akuntansi dana, akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen.

Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi.

5.1. Fokus Pengukuran

Fokus akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting bagi pihak – pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Namun demikian, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala (*constraint*), yaitu: objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas.

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan

sebenarnya diantara kelima teknik tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi, seiring dengan adanya reformasi sektor publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi akrual atau akrual modifikasian. GASB bahkan merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan akuntansi kas dan menggantinya dengan akuntansi dana.

Akuntansi keuangan sektor publik adalah salah satu jenis akuntansi maka dalam akuntansi keuangan sektor publik juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada organisasi sektor publik. Proses pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Transaksi yang bersifat ekonomi adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan proses pengidentifikasian berkaitan erat dengan proses pengukuran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis atau sebesar nilai wajarnya. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut atau nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan kemudian dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.2. Sistem Pencatatan dan Basis Akuntansi

Sistem Pencatatan

Akuntansi keuangan sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi yang di dalamnya tentu terdapat juga proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di organisasi sektor publik. Proses selanjutnya setelah pengidentifikasian dan pengukuran adalah pencatatan. Sementara itu, sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry*.

Single Entry

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan semacam ini disebut pembukuan dan merupakan bagian kecil dari akuntansi.

Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol.

Sebelum era reformasi, landasan hukum bagi pelaksanaan akuntansi pemerintahan adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974, PP No. 5 dan 6 Tahun 1976 dan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Tahun 1981. Pengelolaan keuangan pemerintahan pada era pra reformasi tersebut menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen/lembaga yang

disusun secara manual dan menggunakan sistem pencatatan single entry.

Akibatnya, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aset tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu entitasnya pada saat itu. Oleh karena itu, pada era tersebut, pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang merupakan gambaran mengenai posisi keuangan pemerintah.

Double Entry

Sistem pencatatan double entry atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi di catat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Aset} &= \text{Utang} + \text{Ekuitas} \\ \text{Aset} + \text{Belanja} &= \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan} \end{aligned}$$

Pada sistem pencatatan double entry organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aset dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama juga dilakukan dalam mencatat belanja. Sementara untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan dicatat di sisi debit jika suatu transaksi mengakibatkannya berkurang dan dicatat di sisi kredit jika suatu transaksi mengakibatkannya bertambah.

Kelemahan yang dimiliki sistem pencatatan single entry menyebabkan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik beralih ke sistem pencatatan double entry. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan oleh PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pencatatan yang resmi digunakan sejak itu adalah sistem pencatatan *double entry*.

Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan pada pemerintahan, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran.

Basis Akuntansi

Salah satu proses dalam akuntansi yang penting adalah masalah pengakuan (recognition). Proses ini berkaitan dengan kapan suatu transaksi ekonomi diakui kemudian dicatat. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana yang termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pengakuan dapat disimpulkan sebagai penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Oleh karena itu, dalam penentuan tersebut, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi. Basis akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, basis akuntansi terbagi atas dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, basis akuntansi pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, meliputi basis kas, basis kas modifikasian, basis kas menuju akrual dan basis akrual.

Basis Kas

Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.

Basis kas digunakan di berbagai organisasi sektor publik. Basis kas telah digunakan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia selama era pra reformasi. Hal ini dikarenakan pada era tersebut pemerintah hanya fokus pada perhitungan anggaran negara yang mana dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Keunggulan basis kas adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Akan tetapi dengan basis kas, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu, muncul basis kas modifikasian di mana organisasi tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aset dan utang yang timbul.

Basis Kas Modifikasian

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modifikasian (*modified cash basis*) adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual. Pada saat itu, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Oleh karena itu, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

Basis Kas Menuju Akrua

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Oleh karena itu, pada PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan pemerintah hanya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* merekomendasikan penerapan basis akuntansi yang tidak murni berdasarkan basis kas dan basis akrual. GASB sangat memperhatikan fokus perhitungan akuntansi dan basis akuntansi.

Basis Akrua

PP No. 71 Tahun 2010 hadir menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 sebagai standar akuntansi pemerintahan yang baru. Keberhasilan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah Selandia Baru memberikan dorongan perubahan basis akuntansi di Indonesia. Basis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komperhensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Pengaplikasian basis akrual di dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan sektor swasta

karena orientasi organisasi sektor publik difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual*) selambat-lambatnya pada tahun 2015. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Ragam laporan dalam konsep akrual tidak dibuat seragam. Tiap organisasi sektor publik mempunyai daftar laporan yang memungkinkan jumlahnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan karena perbedaan kerja antar organisasi. Namun, persamaannya terjadi dalam proses pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional di berbagai organisasi karena alur penerimaan dan pembayaran yang konsisten antar organisasi.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang wajib dihasilkan pemerintah pusat dan daerah terbagi atas dua jenis pelaporan yaitu pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pelaporan finansial meliputi neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Sementara itu, pelaporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial diakui berdasarkan basis akrual. Sedangkan, pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara/daerah (APBN/D).

Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang

dikonsumsi, diubah dan diperoleh. Basis akrual juga menunjukkan gambaran pendapatan dan sebagai alat ukur modal. Akan tetapi, basis akrual membutuhkan pertimbangan subjektivitas dalam penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dan membutuhkan prosedur administrasi yang rumit serta peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

5.3. Teknik Akuntansi Sektor Publik

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik:

- 1) Akuntansi Anggaran
- 2) Akuntansi Komitmen
- 3) Akuntansi Dana
- 4) Akuntansi Kas
- 5) Akuntansi Akrual

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

1) Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi anggaran.

Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

Akuntansi anggaran (*budgetary accounting*) mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban. Ide dibalik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.

Hasil yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang sejenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada dua masalah, yaitu:

a. Level agregasi

Contoh yang baik di mana level agregasi yang diadopsi oleh akun-akun anggaran mempengaruhi daya bandingnya ada di pemerintah daerah. Satu otoritas mungkin menerbitkan akun-akun

anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan. Kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya.

Banyak organisasi yang membuat akun-akun anggaran seiring dengan anggaran namun hanya membandingkan dua diantaranya secara global. Contoh, akun-akun dan anggaran mungkin saja dibuat secara detail tetapi hanya total pembelanjaan bersih untuk setiap divisi yang memberikan jasa tersebut saja yang dibandingkan dengan anggaran, menunjukkan apakah ada pembelanjaan yang kurang atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk menjelaskan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang jumlahnya melebihi presentase atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya namun tidak dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat harga umum.

b. Logika dari akuntansi anggaran

Logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan akun-akun harus dibandingkan secara berkesinambungan sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki perbedaan tersebut. Hal ini berlaku bagi pengguna eksternal dan internal dari informasi. Dengan melaporkan hanya dua kolom (anggaran dan aktual saja), tidak hanya tujuan utama dari akuntansi anggaran ini saja yang tidak dapat tercapai, melainkan akan memerlukan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan pengguna yang spesifik atas perbedaan yang dapat di hindarkan apabila akun-akun itu sendiri telah menyediakan analisis yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa akuntansi anggaran lebih berfokus pada bentuk akunnya dari pada isinya.

2) Akuntansi Komitmen

Akuntansi Komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi

komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, manajer perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (*overcommit*). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (*over commit the budget*).

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (*legal liability*) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.

Akuntansi komitmen (*commitment accounting*) dapat digunakan bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Sebagai konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian,

akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran.

Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.

Sebagai contoh, misalnya manajer memesan 100 kotak kapur tulis. Manajer ini telah menentukan pemasok mana yang akan dipilih dan harga sekarang dari kapur ini, misalnya adalah Rp. 5000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirimkan kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga Rp. 5000 per kotaknya, manajer mendebit beban. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi jumlah dari faktur yang kemudian akan diterima, seperti misalnya pemasok tidak memiliki 100 kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang salah dari manager. Maka kreditnya tidak menuju pada pemasok (bukan utang atau kas yang diberikan kepada pemasok) namun pada akun pemesanan sebagai berikut:

Kapur	500.000
Pesanan kepada pemasok	500.000

Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi:

Pesanan kepada pemasok	500.000
Utang kepada pemasok	500.000

Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan, jurnal koreksi harus dibuat, misalnya ternyata harga kapur tersebut bukan Rpp.5000, tetapi Rp 5.500, maka jurnalnya sebagai berikut:

Pesanan kepada pemasok	500.000
Kapur	50.000
Utang kepada pemasok	550.000

Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan.

Kritik atas akuntansi komitmen

Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar memberikan hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran mereka, mereka perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang mencakup penerimaan dan pembuatan faktur saja, manajemen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau terlalu berkomitmen (*over committed*) kepada anggarannya. Tentu saja manajer yang berhati-hati akan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tidak memasukan pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat catatan mereka sendiri mengenai hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran mereka *over committed*. Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan, tidak akan di catat sampai faktur dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya pengendalian anggaran memenuhi beban. Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini dalam akun - akun. Masalah ini adalah bahwa pos tertentu yang telah didukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban. Secara umum, tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat di batalkan dengan mudah. Maka sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi di mana pesanan tersebut baru dibuat.

Terdapat banyak masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis akrual yang lebih berbahaya ketika organisasi menerapkan sistem akuntansi komitmen ini. Misalnya, ada manajer yang anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum akhir tahun anggaran. Manajer mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat pengeluaran anggaran terlalu rendah (*under-spent*) dan hal ini dapat menyebabkan anggaran tahun berikutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual, untuk memastikan bahwa seluruh anggaran di belanjakan, maka pesanan tambahan akan diajukan dan faktur yang diterima akan dicatat. Hal ini menjadi masalah, namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan sampai dengan faktur tersebut diterima.

Jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara, kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran dalam akun-akun tertentu.

Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konveksi dari akuntansi komitmen menjadi akrual biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

Pesanan yang dibuat	xxx
Belanja ABC	xxx
Belanja XYZ	xxx

Jurnal ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga akun yang di catat kembali menjadi komitmen yang di catat.

3) Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Pengertian Akuntansi Dana

Pada organisasi sector publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana”

dimaknai sebagai dana kas (*cash fund*). Tiap – tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah; beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lainnya diambil dari laci lainnya. Namun saat ini “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non kas dan utang diperhitungkan didalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (Perseroan Terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (*fund*) dan organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana (*series of fund*), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Pengertian dana berdasarkan GASB (1999 par.208) adalah:

“A fiscal and accounting entity with a self balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balances, and change therein, which are segregated for the purposes of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, and limitations.”

Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana.

Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti itu perusahaan swasta dapat menggunakan sumber

daya yang dimiliki untuk keperluan apapun yang penting bagi mereka adalah adanya laba yang berbeda dengan organisasi sektor publik dimana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu. Contohnya pemerintah menerima pinjaman dari *world bank* (bank dunia) sebesar RP. 10 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Maka, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menggunakan dana RP. 10 miliar tersebut untuk pembangunan jembatan dan jalan.

Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang dimiliki organisasi sektor publik, masing-masing mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor eksternal (pembatasan eksternal), faktor internal (perencanaan manajemen), Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi sektor publik membuat dana-dana (*funds*) dalam sistem akuntansinya. Pemasukan yang dimiliki organisasi sektor publik kemudian diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol apakah suatu dana tertentu telah digunakan sesuai dengan tujuannya.

Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana (*donatur*). Oleh karena itu organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana (*funds accounting*) untuk mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (*restricted funds*) tersebut sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada.

Dana adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana itu, terdapat kesatuan akun sendiri yang terdiri atas aset (aktiva). Kewajiban dan ekuitas dana. Dengan demikian, sumber daya suatu organisasi sektor publik yang terdiri atas dana-dana tersebut dapat di gambarkan dalam gambar berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Dana1} \\ A = K + ED \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Dana2} \\ A = K + ED \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Dana3} \\ A = K + ED \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Dana 4} \\ A = K + ED \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Dana5} \\ A = K + ED \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Dana6} \\ A = K + ED \end{array}$$

Penggunaan istilah dana bagi organisasi nirlaba dan institusi pemerintah berbeda dengan istilah dana yang sering digunakan oleh entitas swasta. Bagi perusahaan komersial, dana adalah bagian dari aktivitya yang dicadangkan karena akan di gunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan bagi organisasi nirlaba dan kalangan instansi pemerintah, dana adalah suatu entitas akuntansi tersendiri. Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menajadi dua yaitu:

- a. Dana yang bisa dibelanjakan (*expendable funds*)
Dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.
- b. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (*nonexpendable funds*)
Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Digunakan sebagai pendukung dari expendable funds

Persamaan Akuntansi Dana

Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut:

$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$

Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa:

$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} = \text{EKUITAS}$

Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah

ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.

Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Dalam akuntansi dana, dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (*measurement focus*). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain. Contoh, kalau basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya aktiva lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalkan sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah:

Belanja Kendaraan	200.000.000
Kas	200.000.000

Dengan cara tersebut, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di Laporan Pendapatan dan Belanja Dana (Fund's Statement or Revenues and Expenditure) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada

waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (fund balance).

Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh adalah:

Kendaraan	200.000.000
Kas	200.000.000

Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang jangka panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi (cash modified basis).

Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 200 juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan, yaitu:

Belanja Kendaraan	200.000.000
Kas	200.000.000
Kendaraan	200.000.000
Ekuitas Dana	200.000.000

Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang. Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh karena itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban serta memasukkan dalam laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga menunjukkan perubahannya dalam tahun tersebut.

4) Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil dan objektif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (*overstated*). Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran (*unwise expenditure atau overspending*).

5) Akuntansi Akruwal

Akuntansi akruwal dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akruwal diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Basis akruwal diterapkan agak berbeda antar Proprietary fund (*full accrual*) dengan Governmental fund (*modified accrual*) karena biaya (*expenses*) diukur dalam Proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. *Expense* adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. *Expenditure* adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena *Governmental fund* tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), *expenditure* yang diukur bukan expense.

Pada Governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis. Expenditure di accrued, tetapi revenue dicatat berdasarkan kas basis, yaitu pada saat diterima bukan saat diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPh dan fee (*retribusi*) dihitung pada saat diterima kasnya. Salah satu pengecualian adalah *property tax* (PBB) yang di accrued karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*proper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*).

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan konsep akuntansi anggaran. Apakah kelebihan dan kelemahannya?
2. Jelaskan konsep akuntansi komitmen. Apakah kelebihan dan kelemahannya?
3. Jelaskan konsep akuntansi kas. Apakah kelebihan dan kelemahannya?
4. Jelaskan konsep akuntansi akrual. Apakah kelebihan dan kelemahannya?
5. Jelaskan konsep akuntansi akuntansi dana. Apakah kelebihan dan kelemahannya?

BAB 6

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menyebutkan dasar hukum sistem akuntansi keuangan daerah
2. Mampu menjelaskan struktur organisasi pemerintah daerah
3. Mampu memahami dan menjelaskan pengendalian internal

Menurut Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002:

“Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.”

6.1. Dasar Hukum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Presiden Republik Indonesia, 2004a)

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pinjaman Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Hibah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
- k. Peraturan menteri keuangan no 238 tahun 2011 tentang pedoman umum akuntansi pemerintahan
- l. Permendagri no 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Presiden Republik Indonesia, 1999a) dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Presiden Republik Indonesia, 1999b) yang menggantikan

UU nomor 5 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan daerah yang mengurus rumah Tangganya sendiri.

6.2. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 (Indonesia, 2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Menurut Halim (2007) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut: "Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan".

Menurut Abdul Halim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Menurut (Nordiawan, 2006) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat di definisikan sebagai berikut: "Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi."

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006) yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan: "serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”

Definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Gade (2000) adalah: Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan
4. Sistem Teknologi Informasi.

Namun untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut Bastian (2010) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan biaya versus manfaat (*cost versus benefit*) dalam menghasilkan suatu informasi.

6.3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut:

1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)
SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.
2. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)
SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:
 - a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.
 - b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

6.4. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari:

1. Pengakuan Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus

dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Dengan kata lain, kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah.

Poin penting dari kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran dan penyajian. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu Basis kas dan basis Akrua.

a. Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas, menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai (Indra Bastian, 2010:42).

Dalam Standar Akuntansi pemerintah (SAP) No 01 - Basis Akuntansi, menerangkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas laporan.

Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan realisasi Anggaran.

b. Basis AkruaI (Accrual Basis)

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 01 – Basis Akuntansi, Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi”.

Cara pembuktian akrual basis membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan sudah atau belum.

Basis akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas. Dalam laporan keuangan pemerintah, basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Pengukuran Akuntansi

“Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah” (USAID 2009). Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual-beli ketika transaksi itu dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku).

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya tentu saja setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi

(jenis belanja), organisasi dan fungsi untuk melaksanakan aktivitas seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

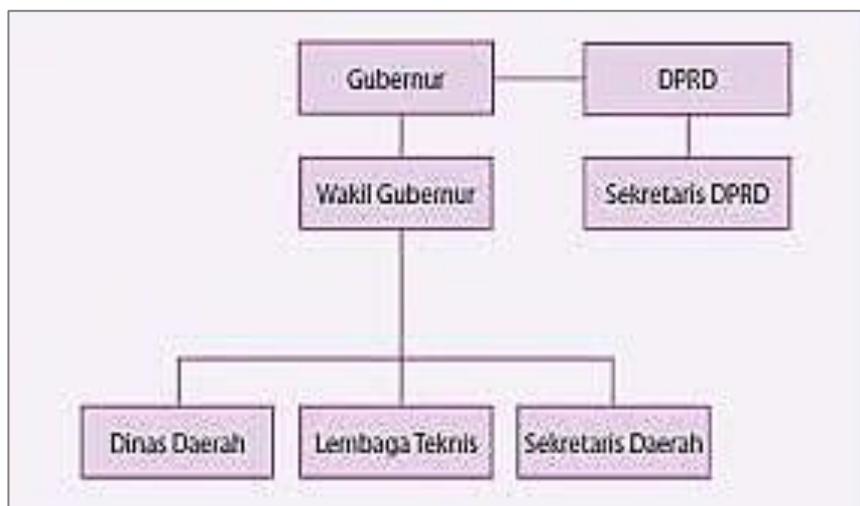
3. Penyajian Akuntansi

Ikhtisar-ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai dinas atau instansi pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau Badan Pengawas Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi pemerintah daerah terdiri atas Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dibawah ini bagan struktur Pemerintah Daerah, sebagai berikut:



Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD (dalam hal ini adalah DPPK – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (*reciprocal account*) yaitu akun Rekening Koran-Pusat (RK-Pusat) yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD (RK-SKPD) yang ada di PPKD.

Akuntansi RK-Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. Akun “RK-Pusat” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunaannya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “RK-Pusat” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda).

6.6. Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat

melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan mencakup unsur-unsur pengendalian intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dipercayainya informasi dan data, serta ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Agar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik, maka SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) harus disusun dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalian intern secara baik dan efektif pada suatu pemerintahan, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas publik dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58 dengan sangat tepat mengamanatkan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan, agar mengatur dan menyelenggarakan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan

secara menyeluruh, untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/negara.

Struktur/Kerangka Pengendalian Intern

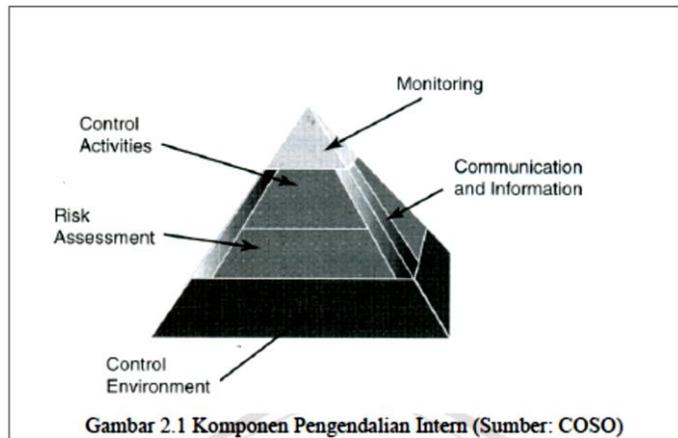
Dalam praktik, terdapat beberapa struktur/kerangka (framework) pengendalian intern yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam mengembangkan sistem pengendalian intern.

1. *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* Pengendalian intern–Integrated Framework

COSO merupakan suatu komite yang disponsori lima organisasi profesi di Amerika Serikat yang dibentuk untuk menindaklanjuti rekomendasi The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, atau yang disebut juga Treadway Commission, terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kelima organisasi profesi yang mensponsori pembentukan COSO adalah IIA (Institute of Internal Auditors), AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), FEI (Financial Executive Institute), AAA (American Accounting Association), dan IMA (Institute of Management Accountants).

2. *Criteria of Controls (CoCo—The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)*

Dengan mengacu pada model COSO, para akuntan di Kanada mengembangkan model pengendalian intern yang lebih ‘ramah pengguna’ dan lebih terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan pemeriksaan. Model ini disebut sebagai Criteria of Controls (CoCo). Model ini terdiri dari empat komponen dan komponen-komponen tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan 20 kriteria. Komponen dan kriteria model Coco adalah sebagai berikut (Sawyer, Dittenhofer and Cheiner, 2005).



3. OKP6

Sejalan dengan CoCo, dengan mengacu pada COSO para internal pemeriksaan yang tergabung dalam IIA menyusun panduan yang lebih operasional untuk mengimplementasikan COSO. Panduan ini kemudian dikembangkan di Indonesia yang kemudian diberi nama OKP6.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur SPIP mengacu pada konsep Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;

- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang

konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

Begitu pula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- 2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- 3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- 5) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- 6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti:

- 1) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik atas aset;
- 5) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi;
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan

operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi Pemerintahan.

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Selain itu perlu diingat bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (*soft factor*). Peraturan yang ada bukan merupakan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen dan pejabat dan pegawai instansi pemerintah.

6.7. Jenis Transaksi

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi Non-Kas Pemda, dan transaksi Rekening Antar-Kantor (RAK), yaitu antara PPKD-SKPD. Di samping itu, berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi ke dalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.

- **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- **Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi: Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

- **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman daerah.

- **Transaksi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.

- **Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian**

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar; sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

- **Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang dan Ekuitas**

Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja). Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya (lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

- **Depresiasi**

Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker.

6.8. Kode Rekening

Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. Kode perkiraan seragam dan konsisten mutlak diperlukan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka dalam era otonomi pun tetap diperlukan informasi keuangan per wilayah ataupun secara nasional untuk analisis fiskal maupun ekonomi makro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya harmonisasi praktik akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuniansinya.

Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi

perkiraan dan pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep Government Finance Statistk (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selain berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaan (MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan klasifikasi ekonomi.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seperti contoh dibawah ini. Untuk lebih lengkap klik link dibawah ini:

<http://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=hukum&id=Lampiran%20PERATURAN%20MENTERI%20DALAM%20NEGERI%20%20NOMOR%2013%20TAHUN%202006%20%20TENTANG%20%20PEDOMAN%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DAERAH>

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 DAN ORGANISASI**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1			URUSAN WAJIB
1	01		Pendidikan
1	01	01	Dinas Pendidikan
1	01	02	Kantor Perpustakaan Daerah
1	01	03	Det.....
1	02		Kesehatan
1	02	01	Dinas Kesehatan
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	03	Rumah Sakit Jiwa
1	02	04	Rumah Sakit paru-paru
1	02	05	Rumah Sakit Ketergantungan Obat
1	02	06	Det.....
1	03		Pekerjaan Umum
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	Dinas Bina Marga
1	03	03	Dinas Pengairan
1	03	04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota
1	03	05	Dinas Cipta Karya
1	03	06	Det.....
1	04		Perumahan
1	04	01	Dinas Permukiman
1	04	02	Dinas Pemadam Kebakaran *)
1	04	03	Dinas Pemakaman *)
1	04	04	Det.....
1	05		Penataan Ruang
1	05	01	Dinas Tata Ruang *)
1	05	02	Det.....
1			Perencanaan Pembangunan
1	06	01	BAPPEDA
1	06	02	Det.....
1	07		Perhubungan

6.9. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur dan sistem dari akuntansi keuangan daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa sub sistem dan prosedur menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 233 terdiri dari:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi asset tetap/barang milik daerah
4. Prosedur Akuntansi selain kas

- **Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 pasal 26, pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis-jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah retribusi daerah tersebut tentu saja sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud di atas dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud tersebut adalah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, jasa giro, pendapatan bunga, dan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

Sedangkan prosedur dari akuntansi pendapatan daerah adalah mulai dari Satuan Kerja atau penyeter setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS) menyampaikan Surat Tanda Setoran (STS) tersebut ke Unit Pembendaharaan. Unit pembendaharaan selanjutnya mengesahkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan memberi tanda ke STS tersebut. Unit Pembendaharaan selanjutnya merekam Surat Tanda Setoran (STS) tersebut ke dalam tabel Surat Tanda Setoran (STS) dalam database, selanjutnya dibuat rekap Surat Tanda Setoran (STS). Satu tembusan Surat Tanda Setoran (STS) diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan sebagai arsip.

Unit pembukuan mengarsipkan Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima dari Unit pembendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data Surat Tanda Setoran (STS) divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara computer dan tidak memerlukan perekaman ulang data Surat Tanda Setoran (STS). Dengan proses posting ini maka data Surat Tanda Setoran (STS) yang terdapat dalam tabel Surat Tanda Setoran (STS) divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai table posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya Daftar Transaksi dan posting (DTP). Selanjutnya Daftar Transaksi dan posting (DTP) diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan Surat Tanda Setoran (STS).

Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka Laporan keuangan dicetak selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.

- **Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diterima dari rekanan, Satuan Kerja mengajukan SPP ke unit Pembendaharaan

desertai dengan bukti pendukung antara lain faktur pembelian dan bukti pendukung lainnya.

Unit Pembendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel Surat Perintah Pembayaran (SPP) dalam database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas Surat Perintah Pembayaran (SPP). Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.

Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman Surat Perintah Pembayaran (SPP) yaitu membandingkan antara Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran hukum Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database.

Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke unit Pembendaharaan. Jika sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu computer menyetujui Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang secara otomatis computer merekam data Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke dalam tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi letak SPMU. Berkas Surat Perintah Pembayaran (SPP), dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Pembendaharaan.

Unit Pembendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat di tabel SPMU. Unit Pembendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit Pembendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat mencetak SPMU.SPMU

tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan dan Arsip.

Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit Pembendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data SPMU yang sudah terdapat tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan, selanjutnya dilakukan pencatatan Daftar Transaksi dan Posting (DTP) dan Daftar Transaksi dan Posting (DTP) diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU.

Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah dan Arsip.

- **Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah**

Realisasi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset adalah realisasi yang berasal dari berbagai usaha pemanfaatan aset yang telah dihapuskan. Usaha pemanfaatan ini dapat berupa penjualan, tukar guling (*ruilslag*), penyewaan, atau pelaksanaan kerja sama operasi. Untuk itu, sebelum ada usaha pemanfaatan ini, diasumsikan bahwa pada awal tahun anggaran sudah ada aset yang diidentifikasi telah dihapuskan dari pembukuan tetapi belum dilaksanakan usaha pemanfaatannya.

Dengan demikian, proses pemanfaatan aset daerah yang dihapuskan dimulai dari diterbitkannya surat persetujuan Kepala Daerah dan DPRD untuk menghapuskan suatu aset. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Daerah, Unit Perlengkapan

menyusun dokumen bagi usaha pemanfaatan, yang bias jadi berbentuk dokuman pelanggan atau surat penunjukan kerja atau lainnya yang dapat dibenarkan oleh peraturan pemanfaatan asset daerah.

Berdasarkan pemberitahuan oleh Unit Perlengkapan, berbagai pihak seperti Rekanan akan memasukan tawarannya kepada Unit Perlengkapan atau Panitia Pelanggan untuk mendapatkan hak membeli/tukar guling (ruilslag)/menyewa/atau melaksanakan kerja sama operasi.

Jika unit perlengkapan atau Panitia Pelelangan setuju menunjuk atau menetapkan pemenang lelang, maka Unit Perlengkapan menunjuk pembeli atau pelaksana kontrak. Pembeli atau pelaksana kontrak kemudian mentransfer uang sebagai imbalan pemanfaatan asset Pemda ke Kas Daerah.

Atas penerimaan uang ini, Kas Daerah membuat Surat Tanda Setoran (STS), yang kemudian diserahkan kepada pihak pembeli atau pelaksana kerja dan kepada Unit Pembukuan. Oleh pihak pembeli atau pelaksana kerja, Surat Tanda Setoran (STS) ini dijadikan dokumen dasar bagi akuntansi atas penerimaan pembiayaan dari penghapusan asset daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dari penghapusan asset daerah ini dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan.

- **Sistem dan Prosedur Akuntansi selain Kas**

APBD dan perda Cadangan yang ditetapkan, Unit Pembendaharaan akan menertibkan SPP. SPP akan direkan ke dalam database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materil dan formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi menemukan ketidakbenaran materil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta hasil rekaman nya ke Unit Pembendaharaan, yang selanjutnya akan

memperbaikinya dan kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.

Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar disposisi yang berisikan bahwa SPP dan hasil rekaman SPP sudah benar sehingga Unit Pembendaharaan sudah bias mencetak Surat Perintah Membayar (SPM). Unit Pembendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, unit Pembendaharaan akan mencetak SPM 3 (tiga) lembar. SPM akan dikirim ke Kas daerah, Unit Pembukuan dan arsip di Unit Pembendaharaan.

Berdasarkan SPM yang diterima, kas Daerah akan mentransfer dana ke rekening Dana Cadangan dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit Pembendaharaan, Unit Pembukuan dan Arsip.

Berdasarkan SPM dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Pembendaharaan dan Kas daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Pembendaharaan dari database. Dari posting tersebut akan dicetak Daftar Transaksi dan Posting (DTP). Daftar transaksi dan Posting (DTP) tersebut akan diverifikasikan dengan membandingkan Daftar transaksi dan Posting (DTP) dengan DS (SPMU, Surat Tanda Setoran (STS), dll). Jika dari hasil verifikasi ditemukan ada ketidaksesuaian antara Daftar transaksi dan Posting (DTP) dan DS maka akan dilakukan proses posting dan pencetakan Daftar transaksi dan Posting (DTP) kembali. Jika Daftar transaksi dan Posting (DTP) sudah sesuai dengan dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.

Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database yang sama dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol yang diverifikasi untuk menguji kebenaran proses computer dalam membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses pembuatan

LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai proses pembuatan LPJ benar.

Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan laporan Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.

6.10. Dokumen Sumber

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan dokumen sumber yang dihasilkan dari kegiatan keuangan pemerintah daerah. Dokumen sumber berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksi antara lain:

a) Akuntansi Pendapatan

Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dokumen Sumber yang digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yaitu:

Transaksi	Dokumen sumber
Penerimaan dana perimbangan.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN (Nota Kredit Bank), ⤴ Laporan Posisi Kas Harian Bank.
Pendapatan Daerah lain-lain yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Surat tanda bukti penerimaan, ⤴ Laporan Posisi Kas Harian Bank, ⤴ Bukti penerimaan lainnya (Berita acara).

Contoh Dokumen Sumber:

PENGUNAAN RK-PPKD DAN RK-SKPD	
RK-PPKD DAN RK-SKPD MERUPAKAN REKENING TIMBAL BALIK (<i>RECIPROCAL ACCOUNT</i>) ANTARA SKPD DENGAN SKPKD, PENGGUNAAN AKUN INI DIDASARKAN PADA PENGGUNAAN KONSEP HOB0, JENIS AKUN INI MERUPAKAN AKUN REAL, DIMANA RK-PPKD MERUPAKAN EKUITAS YANG DIMILIKI SKPD, RK-SKPD MERUPAKAN REKENING ASET YANG DIMILIKI SKPKD	
SKPD	SKPKD
Penerimaan SP2D UP/GU/TU	Penerbitan SP2D UP/GU/TU
Kas Bendahara Pengeluaran	RK-SKPD
RK-PPKD	Kas Daerah
Penerimaan SP2D LS Gaji dan Tunjangan (pembayaran gaji di asumsikan di transfer langsung ke pegawai tanpa prantara bendahara pengeluaran)	Penerbitan SP2D LS Barang Jasa
Beban....	RK-SKPD
RK-PPKD	Kas Daerah
Penerimaan SP2D LS Barang dan Jasa	Penerbitan SP2D LS Barang Jasa
Aset (Aset tetap atau Persediaan)	RK-SKPD
RK-PPKD	Kas Daerah
Setoran Pendapatan (Bendahara Penerimaan)	Penerimaan Setoran Pendapatan SKPD
RK-PPKD	Kas Daerah
Kas Bendahara Penerimaan	RK-SKPD
Setoran UYHD (Bendahara Pengeluaran)	Penerimaan Setoran UYHD SKPD
RK-PPKD	Kas Daerah
Kas Bendahara Pengeluaran	RK-SKPD
Setoran Kas Tahun Lalu Yang Disetor Di Tahun Berjalan (Bendahara Pengeluaran)	Penerimaan Setoran Kas Tahun Lalu Yang Disetor Di Tahun Berjalan)
RK-PPKD	Kas Daerah
Kas Bendahara Pengeluaran	RK-SKPD

Jurnal Standar

Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi

pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber penerimaan kas berasal.

Jurnal penerimaan pendapatan

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Dana Perimbangan	xxx
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	xxx

b) Akuntansi Belanja

Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Dokumen Sumber yang digunakan

No.	Transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen
1	Belanja Bunga	- SP2D LS - Nota debit bank - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD
2	Belanja Subsidi	- SP2D LS - Nota debit bank - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala Daerah
3	Belanja Hibah	- SP2D LS - Nota debit bank - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Keputusan Kepala Daerah
4	Belanja Bantuan Sosial	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala Daerah
5	Belanja Bagi Hasil	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala Daerah
6	Belanja Bantuan	- SP2D LS - Bukti pengeluaran	- SPM - SPD

No.	Transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen
	Keuangan	lainnya	- Berita acara - Keputusan Kepala Daerah
7	Belanja Tak Terduga	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Keputusan Kepala Daerah

Contoh SP2D LS



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat : Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Telp. (0543) 21062,22695 Fax. (0543) 21079

Lembar Ke : 1
Kode No : K0020
Nomor : 165/HL/51121/2015

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah : Ramos Wibowo
2. Nama pegawai yang diperintah : Rosalina Yulia
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 : Staff Administrasi
- b. Jabatan : Staff Administrasi
- c. Tingkat menurut peraturan perjalanan : Tingkat II
4. Maksud perjalanan dinas : 1. Perjalanan Dinas
2. Rapat Luar Kota
3. Penyebaran
5. Alat angkut yang dipergunakan : Mobil
6. a. Tempat berangkat : Depok
- b. Tempat tujuan : Yogyakarta
7. a. Lamanya perjalanan dinas : 3 Hari
- b. Tanggal berangkat : 14 Maret 2015
- c. Tanggal harus kembali : 16 Maret 2015
8. Penghantar :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1	Rosalina Yulia	19740607 200003 1 018	Staff Administrasi	Staff Administrasi
2	Ronald Frank	19740607 200003 1 020	Staff Operasional	Staff Operasional

9. Pembebanan anggaran :
 - a. Instansi : Perjalanan Dinas
 - b. Mata anggaran : Perjalanan Dinas
10. Keterangan lain-lain : Perjalanan Dinas

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Maret 2015

Staff IT

NIP. Ramos Wibowo
19740607 200003 1 014

Jurnal Standar

Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- Pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD
- Pembayarannya dengan SP2D LS kepada pihak ketiga

Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan langsung ke pihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di PPKD).

Jurnal pencatatan transaksi belanja

Bunga	xxx
Belanja Subsidi	xxx
Belanja Hibah	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx
Belanja Bagi Hasil	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx
Belanja Tidak Terduga	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

c) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto.

Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari:

- Penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan piutang daerah.

Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari:

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal pemerintah daerah
- Pembayaran pokok pinjaman (utang)
- Pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Contoh Laporan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KOTA BIMA
NERACA
Per 31 Desember 2007 dan 2006

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2007	2006
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	52.270.947.804,43	24.072.312.952,37
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.407.570.822,00	750.334.733,00
5	Deposito	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00
6	Belanja dibayar dimuka	779.755.031,83	779.755.031,83
7	Piutang Pajak	43.479.557,00	43.479.557,00
8	Piutang Retribusi	152.297.750,00	152.297.750,00
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.493.245.595,16	3.821.325.664,16
10	Piutang Lain-lain	1.953.412.024,00	
11	Persediaan	825.445.630,00	790.100.730,00
12	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 11)	77.776.154.214,42	33.259.606.418,36
13	INVESTASI JANGKA PANJANG		
14	Investasi Non Permanen		
15	Dana Bergulir	2.533.456.299,00	-
16	Jumlah Investasi Nonpermanen (15)	2.533.456.299,00	-
17	Investasi Permanen		
18	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima	2.511.565.350,75	2.450.322.088,00
19	Dana Bergulir	-	2.427.257.868,00
20	Jumlah Investasi Permanen (18 s/d 19)	2.511.565.350,75	4.877.579.956,00
21	Jumlah Investasi Jangka Panjang (16 + 20)	5.045.021.649,75	4.877.579.956,00
22	ASET TETAP		
23	Tanah	58.305.831.353,00	54.244.986.603,00
24	Gedung dan Bangunan	152.115.447.722,69	128.404.442.205,13
25	Peralatan dan Mesin	70.313.988.950,51	57.425.432.482,01
26	Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.240.215.263,94	66.998.101.199,94
27	Aset Tetap Lainnya	7.555.042.407,69	4.678.556.347,69
28	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.632.036.400,00	8.951.707.782,17
29	Akumulasi Penyusutan	(45.828.952.504,27)	(30.226.364.101,47)
30	Jumlah Aset Tetap (23 s/d 29)	351.333.609.593,56	290.476.862.518,47

d) Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang.

Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni:

1. Aset Lancar (*Current Asset*); dan
2. Aset Tidak Lancar (*Non-Current Asset*)

Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan) yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang berkaitan dengan rekening realisasi anggaran.

e) Akuntansi Utang PPKD

Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Jurnal–Pengakuan Utang Jangka Panjang

Dana yang disediakan untuk pembayaran	
hutang jangka panjang	xxx
Hutang Jangka Panjang	xxx

Jurnal – Pembayaran Hutang

Hutang Jangka Panjang	xxx
Dana yang disediakan untuk pembayaran	
hutang jangka panjang	xxx

f) Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan terutama dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal dari transaksi-transaksi tersebut. Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi, terdiri dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

Dokumen Sumber yang digunakan

No.	Jenis transaksi	Dokumen sumber
1	Ekuitas dana lancar - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2	Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang pendapatan dana transfer	- SKP/SKR yang belum dibayar - Surat perjanjian pemberian pinjaman - Bukti transfer
3	Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D
4	Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan dalam investasi	- SP2D - Kopi surat perintah
5	Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan dalam aset lainnya	- Surat Keputusan penempatan - SP2D
6	Ekuitas dana investasi - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D
7	Ekuitas dana cadangan - Diinvestasikan dalam dana cadangan	- Perda tentang dana cadangan - SP2D

Contoh Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2007

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak daerah	2.305.236.500,00	1.759.604.837,00	76,33
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2.588.217.200,00	1.550.054.932,00	59,89
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	143.200.000,00	133.524.789,00	93,24
6	Lain Lain PAD Yang Sah	2.636.839.800,00	1.471.440.098,06	55,80
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	7.673.493.500,00	4.914.634.656,06	64,05
8				
9	PENDAPATAN TRANSFER			
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
11	Dana Bagi Hasil Pajak	20.922.053.541,00	17.397.539.673,00	83,15
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	7.237.777.190,00	7.794.790.359,00	107,70
13	Dana Alokasi Umum	204.865.000.000,00	204.865.000.000,00	100,00
14	Dana Alokasi Khusus	32.658.000.000,00	32.658.000.000,00	100,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	265.682.830.731,00	262.715.330.032,00	98,88
16				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	-	1.615.408.600,00	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (18 s/d 19)	-	1.615.408.600,00	-
21				
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
23	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	9.761.669.536,27	5.440.208.805,00	55,73
24	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1.315.460.300,00	1.011.310.300,00	76,88
25	Dana Bagi Hasil dari Prov. NTB	2.357.630.587,52	-	-
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi NTB (23 s/d 25)	13.434.760.423,79	6.451.519.105,00	48,02
27	Total Pendapatan Transfer (15 s/d 26)	279.117.591.154,79	270.782.257.737,00	97,01

6.11. Formulir dan Jurnal

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Jurnal adalah catatan akuntansi awal dalam prosedur akuntansi. Sistem entri jurnal yang digunakan adalah sistem entri ganda (*double entry accounting*) dimana setiap transaksi dibukukan minimal pada dua buah rekening yang berlawanan. Entri ini memperlihatkan nilai (jumlah) debit dan kredit yang terlibat, serta rekening yang cocok untuk jumlah debit dan kredit tersebut dalam jumlah yang sama. Dalam proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal satu hal yang penting adalah masalah pengakuan (*recognition*).

Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat berdasarkan basis akuntansi yang telah ditetapkan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, dan bukan hanya berdasarkan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Ada dua kategori jurnal, yaitu Jurnal Umum dan Jurnal Khusus. Jurnal Umum memuat serangkaian kolom dalam format yang bersifat umum sehingga setiap transaksi akuntansi dapat dicatat. Jurnal Khusus menggunakan format khusus yang disesuaikan dengan tipe transaksi yang relatif sering terjadi. Jurnal khusus memungkinkan transaksi-transaksi yang serupa dicatat, ditotal, dan diposting ke dalam Buku Besar secara lebih efisien. Jurnal khusus terdiri dari:

- a. Jurnal Penerimaan Kas (*Cash Receipt Journal*)
- b. Jurnal Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement Journal*)

Dapat dikatakan jurnal khusus ini menampung sebagian besar transaksi, sehingga jurnal umum hanya mencatat transaksi yang jarang terjadi serta penyesuaian akhir periode.

Format jurnal yang digunakan dalam SAPD Pemerintah Kota Pasuruan:

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BUKTI PENJURNALAN

No. Bukti : Tanggal :

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Jumlah		
Dibuat oleh,		Mengetahui,	
Nama		Nama	
Staff Akuntansi		PPK-SKPD	

6.12. Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Contoh Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BIMA
NERACA
Per 31 Desember 2007 dan 2006

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2007	2006
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	52.270.947.804,43	24.072.312.952,37
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.407.570.822,00	750.334.733,00
5	Deposito	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00
6	Belanja dibayar dimuka	779.755.031,83	779.755.031,83
7	Piutang Pajak	43.479.557,00	43.479.557,00
8	Piutang Retribusi	152.297.750,00	152.297.750,00
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.493.245.595,16	3.821.325.664,16
10	Piutang Lain-lain	1.953.412.024,00	
11	Persediaan	825.445.630,00	790.100.730,00
12	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 11)	77.776.154.214,42	33.259.606.418,36
13	INVESTASI JANGKA PANJANG		
14	Investasi Non Permanen		
15	Dana Bergulir	2.533.456.299,00	-
16	Jumlah Investasi Nonpermanen (15)	2.533.456.299,00	-
17	Investasi Permanen		
18	Penyetoran Modal Pemerintah Kota Bima	2.511.565.350,75	2.450.322.088,00
19	Dana Bergulir	-	2.427.257.868,00
20	Jumlah Investasi Permanen (18 s/d 19)	2.511.565.350,75	4.877.579.956,00
21	Jumlah Investasi Jangka Panjang (16 + 20)	5.045.021.649,75	4.877.579.956,00
22	ASET TETAP		
23	Tanah	58.305.831.353,00	54.244.986.603,00
24	Gedung dan Bangunan	152.115.447.722,69	128.404.442.205,13
25	Peralatan dan Mesin	70.313.988.950,51	57.425.432.482,01
26	Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.240.215.263,94	66.998.101.199,94
27	Aset Tetap Lainnya	7.555.042.407,69	4.678.556.347,69
28	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.632.036.400,00	8.951.707.782,17
29	Akumulasi Penyusutan	(45.828.952.504,27)	(30.226.364.101,47)
30	Jumlah Aset Tetap (23 s/d 29)	351.333.609.593,56	290.476.862.518,47

Laporan Keuangan yang lebih lengkap bisa klik di link
<https://www.scribd.com/doc/260205786/Contoh-laporan-keuangan-daerah-Kota-Bima-pdf>

6.13. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Hasil Retribusi Daerah; yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Nurcholis, 2007). Menurut Yani (2004) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Lain-Lain PAD Yang Sah, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. (Presiden Republik Indonesia, 2004b)

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan dasar hukum sistem akuntansi keuangan daerah!
2. Jelaskan struktur organisasi pemerintah daerah!
3. Sebutkan dan jelaskan pengendalian internal!

SOAL DAN JAWABAN

1. Di dalam Standar Akuntansi Sektor Publik, apa saja hal yang harus di pertimbangkan dalam penerapan Standar Akuntansi?

Jawab:

- a. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
- b. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
- c. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
- d. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika:

- a. Standar terlalu banyak
- b. Standar terlalu rumit

- c. Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya
- d. Standar memiliki tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna
- e. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara:
 - Entitas publik dan entitas non-publik
 - Laporan keuangan tahunan dan interim
 - Organisasi besar dan kecil
 - Laporan keuangan auditan dan non-auditan
- f. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya.

2. Jelaskan Batasan dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal?

Jawab:

- a. Objektivitas
Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder.
- b. Konsisten
Konsisten adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut.
- c. Daya Banding
Laporan keuangan sektor public hendaknya dapat dipertimbangkan antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis

- d. Tepat Waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
 - e. Ekonomis dalam Penyajian Laporan
Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.
 - f. Materialitas
Suatu informasi dianggap materialitas apabila dipengaruhi keputusan.
3. Jelaskan konsep akuntansi kas. Apa kelebihan dan kelemahan akuntansi kas?
- Jawab:
- Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan.
- Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis:
- a. Metode Cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - b. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
 - c. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
 - d. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
 - e. Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
 - f. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis:

- a. Metode Cash basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
 - b. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
 - c. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
 - d. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktik kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card dikategorikan juga sebagai cash basis).
 - e. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
 - f. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
 - g. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.
4. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik?

Jawab:

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- a) Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship).
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

- c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

- d) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

- e) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- f) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

5. Jelaskan karakteristik kualitas laporan keuangan sektor publik?

Jawab:

Karakteristik kualitas laporan keuangan sektor publik:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Guna mencapai maksud ini, diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (*predictive value*), menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (*feedback value*), juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

c. Keandalan

Informasi disebut andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang dapat disajikan secara wajar.

d. Dapat dibandingkan

Identifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan laporan keuangan perusahaan antar periode hendaknya dapat diperbandingkan oleh pemakai. Dengan demikian pemakai dapat memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi

keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian karakteristik ini.

6. Apa yang di maksud dengan akuntansi anggaran dan apa tujuan Teknik ini?

Jawab:

Akuntansi anggaran adalah sistem penyajian akuntansi yang mengacu pada format yang sama dengan anggarannya. Tujuannya: Melihat cara pelaksanaan anggaran yang telah dibuat dapat dikendalikan dan di pertanggung jawabkan kepatuhannya.

7. Apa kelebihan dan kelemahan akuntansi anggaran?

Jawab:

Kelebihan dari Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Namun salah satu kelemahan dari Teknik ini adalah bahwa Teknik ini adalah sangat kompleks.

8. Apa pengertian dana (fund) dalam OSP! Apa bedanya dengan perusahaan komersial?

Jawab:

Pengertian akuntansi dana dalam OSP adalah sumber daya keuangan yang di sediakan oleh OSP yang mempunyai keterbatasan penggunaan, penggunaan dana tersebut dibatasi untuk tujuan atau aktivitas tertentu. Untuk perusahaan swasta dana dapat digunakan untuk keperluan apapun selama masih dalam proses menghasilkan laba sementara tidak dengan dana OSP yang di gunakan hanya untuk tujuan yang spesifik.

9. Apa keunggulan dan kelemahan Teknik akuntansi komitmen?

Jawab:

Kelebihan: sebagai penghalang atas dilakukannya belanja pada jenis atau kelompok yang sama sehingga menyebabkan terlampaui anggaran belanja yang ada sehingga meningkatkan pengendalian anggaran.

Kelemahan: hal tertentu yang telah di dukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban padahal pesanan tersebut bisa dengan mudah dibatalkan.

10. Jelaskan konsep akuntansi komitmen. Apa kelebihan dan kelemahan akuntansi komitmen?

Jawab:

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Dengan adanya konsep ini manajer dapat mengendalikan anggaran. Dalam mengendalikan anggaran, manajer mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan order, hal ini menjadikan sulit untuk mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang berdasarkan pada order yang dikeluarkan.

11. Apa saja faktor yang mempengaruhi karakteristik sektor publik dan sektor privat?

Jawab:

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor privat. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Komponen

lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

- 1) Faktor ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP).
- 2) Faktor politik meliputi hubungan Negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi Negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan.
- 3) Faktor kultural meliputi antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat dan tingkat pendidikan.
- 4) Faktor demografi meliputi antara lain: pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

12. Apakah akuntansi sektor publik dan sektor privat memiliki perbedaan dalam segi manajemen?

Jawab:

Setiap sektor memiliki tujuan yang berbeda, yang mana sektor publik manajemen nya lebih ke tujuan utama nya untuk menyejahterakan publik atau masyarakat, sedangkan dengan adanya sektor privat manajemennya lebih mengarahkan ke keuntungan atau laba (profit).

13. Pada pengadaan barang berikan contoh sifat eksklusif dan tidak eksklusif!

Jawab:

Secara umum barang tidak eksklusif atau barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan

biaya untuk mendapatkannya. Dan barang publik apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.

Sedangkan barang eksklusif/privat adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, jika hanya ada satu es cendol, dan ada seseorang yang mengkonsumsinya maka orang lain tidak bisa mengkonsumsinya.

14. Apakah laporan keuangan akuntansi sektor publik dan sektor privat memiliki kesamaan? Jelaskan!

Jawab:

Ya, laporan keuangannya juga terdapat beberapa persamaan, antara lain:

- 1) Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor privat sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi
- 2) Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor privat mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
- 3) Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.

- 4) Keduanya harus menggunakan dan mengonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna
 - 5) Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.
 - 6) Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.
 - 7) Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
15. Berikan contoh pertanggung jawaban akuntansi sektor publik pada masyarakat, apa saja yang sudah direalisasikan dan apa yang belum?

Jawab:

Salah satu contoh dalam pertanggung jawaban akuntansi sektor publik pada masyarakat yang sudah direalisasikan yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dimana BPJS ini berguna untuk jaminan sosial bagi masyarakat agar bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pertanggung jawaban akuntansi sektor publik pada masyarakat yang belum direalisasikan salah satunya belum sepenuhnya ada perbaikan jalan secara menyeluruh, dimana di daerah-daerah tertentu masih belum adanya jalan yang nyaman.

16. Bagaimana siklus yang berlangsung dalam pengelolaan keuangan daerah?

Jawab:

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental
Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- b. Perencanaan operasional
Tahap kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- c. Penganggaran
Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Pengendalian dan pengukuran
Sedangkan tahap ke empat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.
- e. Pelaporan dan umpan balik
Dan tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan laporan keuangan.

17. Siapa saja yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah?

Jawab:

Yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD.
- b. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

18. Apa dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksi Akuntansi Belanja dan berikan contohnya?

Jawab:

Akuntansi Belanja PPKD yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Salah satu contoh dokumen sumber dari akuntansi belanja sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat : Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Telp. (0543) 21062,22695 Fax. (0543) 21079

Lembar Ke : 1
Kode No : K0020
Nomor : 165/HL/51121/2015

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah : Ramos Wibowo
2. Nama pegawai yang diperintah : Rosalina Yulia
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 : Staff Administrasi
- b. Jabatan : Staff Administrasi
- c. Tingkat menurut peraturan perjalanan : Tingkat II
4. Maksud perjalanan dinas : 1. Perjalanan Dinas
 2. Rapat Luar Kota
 3. Penyegaran
5. Alat angkut yang dipergunakan : Mobil
6. a. Tempat berangkat : Depok
- b. Tempat tujuan : Yogyakarta
7. a. Lamanya perjalanan dinas : 3 Hari
- b. Tanggal berangkat : 14 Maret 2015
- c. Tanggal harus kembali : 16 Maret 2015
8. Pengikut :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1	Rosalina Yulia	19740607 200003 1 018	Staff Administrasi	Staff Administrasi
2	Ronald Frank	19740607 200003 1 020	Staff Operasional	Staff Operasional

9. Pembebanan anggaran :
 - a. Instansi : Perjalanan Dinas
 - b. Mata anggaran : Perjalanan Dinas
10. Keterangan lain-lain : Perjalanan Dinas

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Maret 2015

Staff IT

Ramos Wibowo
NIP. 19740607 200003 1 014

19. Transaksi apa saja yang terjadi pada Akuntansi Pembiayaan?

Jawab:

Transaksi yang terjadi pada Akuntansi Pembiayaan yaitu transaksi penerimaan pembiayaan dan transaksi pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

Transaksi penerimaan pembiayaan:

- a. Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f. Penerimaan piutang daerah.

Transaksi pengeluaran pembiayaan:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok pinjaman (utang).
- d. Pemberian pinjaman daerah.

20. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari APBD dalam pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Menurut Mamesah (1995) APBD sebagai sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, karena fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat dari daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi.
- c. Memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.

21. Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara?

Jawab:

- a. Pasal 1 point 1: Keuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Pasal 6 ayat (1): Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.
- c. Pasal 6 ayat (2): kekuasaan dimaksud dalam ayat (1):
 - Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

22. Apa tugas Menteri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas Pengelolaan Fiskal?

Jawab:

Pasal 8: Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

- d. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- e. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
- f. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

23. Bagaimana pelaksanaan APBN dan APBD?

Jawab:

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran ditunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

24. Jelaskan pengertian dari APBN beserta fungsi dari APBN tersebut?

Jawab:

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam anggaran tersebut tercatat daftar yang sistematis dan juga terperinci yang berkaitan dengan rancangan penerimaan beserta pengeluaran negara selama satu tahun (dari 1 Januari hingga 31 Desember). Perancangan, perubahan, hingga pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan melalui

Undang-undang. Dalam APBN, ada dua jenis Belanja Negara yang dilakukan, yaitu: Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah. Ada pun fungsi-fungsi APBN, di antaranya:

- a. Fungsi alokasi. Dalam hal ini, ada penerimaan dari pajak yang bisa dialokasikan untuk sejumlah pengeluaran bersifat umum (pembangunan jalan, jembatan, atau taman umum);
- b. Fungsi distribusi. Pendapatan yang masuk tak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, tetapi juga bisa dipindahkan untuk dana pensiun hingga subsidi;
- c. Fungsi stabilisasi. Di sini, APBN berperan selaku pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara tetap teratur dan terjaga.

25. Jelaskan pengertian dari APBD beserta fungsi dari APBD tersebut?

Jawab:

APBD merupakan rancangan keuangan tahunan daerah dan didiskusikan dan disetujui secara bersama oleh DPRD serta Pemerintah Daerah. Anggaran ini pun ditetapkan memakai Peraturan Daerah, yakni Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Dengan demikian, APBD bisa dijadikan sebuah wadah dalam rangka untuk menampung sejumlah kepentingan publik yang pada gilirannya akan diwujudkan melalui macam-macam kegiatan ataupun program yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Kemudian, berdasarkan pasal 79 UU Nomor 22 tahun 1999; pasal 3 dan 4 UU Nomor 25 tahun 1999; pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004, APBD terdiri atas tiga jenis, di antaranya:

- Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang sudah dipisahkan, dan pendapatan asli daerah sah lainnya;

- Dana Perimbangan. Jenis dana ini terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK;
- Jenis pendapatan daerah sah lainnya. (Presiden Republik Indonesia, 1999a)

Fungsi-fungsi APBD yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, antara lain:

- a. Fungsi otorasi. Dalam hal ini, anggaran daerah berperan sebagai dasar untuk melaksanakan belanja daerah maupun memperoleh pendapatan pada tahun yang bersangkutan;
- b. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman untuk pengelolaan atau manajemen dan perencanaan sejumlah kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c. Fungsi pengawasan. Sama seperti poin sebelumnya, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemda sudah sesuai dengan ketentuan atau belum;
- d. Fungsi alokasi. Di sini, anggaran daerah yang digunakan harus bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi jumlah anggaran dan pemborosan dalam sumber daya. Dalam fungsi ini, anggaran daerah pun diharapkan dapat menaikkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
- e. Fungsi distribusi. Anggaran daerah yang telah disiapkan harus bisa memperhatikan rasa kepatutan maupun keadilan bagi masyarakat;
- f. Fungsi stabilisasi. Terakhir, anggaran daerah diharapkan mampu menjadi alat pemeliharaan dan penjaga keseimbangan fundamental dalam perekonomian daerah.

26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) dan sebutkan alasan pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah?

Jawab:

Makuda adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan. Alasannya karena sistem yang lama (MAKUDA) dengan ciri-ciri, antara lain single entry (pembukuan tunggal), incremental budgeting (penganggaran secara tradisional yakni rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah, karena beberapa alasan:

- a. Tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.
- b. Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah.
- c. Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja sesuai ketentuan PP No. 105/2000, yaitu:
 - Pasal 5 yang mewajibkan daerah membuat laporan pertanggungjawaban berbasis kinerja.
 - Pasal 8 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output).
PP No. 108/2000

Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi akuntabel dan auditabel artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit.

Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

27. Sebutkan dan jelaskan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah berdasarkan PP 24 Tahun 2005 Tentang SAP?

Jawab:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

28. Jelaskan implikasi terbitnya PP 71 Tahun 2010 terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah?

Jawab:

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

29. Sebutkan dan jelaskan tujuan pelaporan keuangan?

Jawab:

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun

- jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

30. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah?

Jawab:

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan daerah;
 - d. pengeluaran daerah;
 - e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
 - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
31. Kedudukan SAP dalam pengelolaan keuangan negara?
- Jawab:

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai standar untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu agar terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

32. Terangkan mengenai pentingnya keuangan negara secara baik dan benar!

Jawab:

Keuangan negara penting sebagai penopang pembiayaan pencapaian tujuan negara. Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan negara. Keuangan negara meliputi APBN dan APBD. Masalah yang dihadapi di antaranya efektivitas dan efisiensi; prioritas; kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Oleh karena itu azas-azas pengelolaan keuangan negara perlu diterapkan agar tercipta good governance.

33. Berikan penjelasan mengenai keterkaitan antara keuangan negara dan Badan Pemeriksa Keuangan!

Jawab:

BPK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenang BPK termasuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan. Badan yang diperiksa BPK terbatas pada lembaga negara yang terkait keuangan negara.

34. Siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara?
Jawab:

Pasal 6 ayat (1): Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.

Pasal 6 ayat (2): kekuasaan dimaksud dalam ayat (1):

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

35. Apa tujuan dan klasifikasi APBN?

Jawab:

- APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi

disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

36. Apa masalah umum anggaran di Indonesia dalam penyusunan APBN dan APBD?

Jawab:

- APBN/APBD selalu di desain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif.
- Desain APBN/APBD hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), tetapi APBN tidak dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi.
- Asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan sosial, seperti aspek ketimpangan pendapatan.
- Besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Buktinya, alokasi anggaran ke sektor pertanian dan industri tergolong kecil padahal sebagian tenaga kerja berada di sektor tersebut.
- Amanah UU tidak semuanya dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal 5 persen dari APBN, namun selama ini mendapatkan porsi kurang dari 2 persen.

- Penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini.

37. Apa hubungan anggaran dengan akuntansi?

Jawab:

Jika dilihat dari pengertiannya, akuntansi menyajikan data-data historis, menyajikan peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dari hari ke hari secara teratur dan sistematis. Sedangkan anggaran menyajikan data taksiran-taksiran untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan forecasting (taksiran) yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang.

38. Jelaskan apa tujuan dari dilakukannya pengelolaan keuangan daerah?

Jawab:

Pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan utama yakni agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

39. Dasar hukum apa yang digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah?

Jawab:

- 1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 3) UU No 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara.
- 4) UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- 5) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 6) UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang tersebut diatas menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan diatas terbit atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut kemudian mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

40. Sebutkan dan jelaskan batasan atau ruang lingkup daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya?

Jawab:

Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

- d) Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
 - f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
41. Bagaimana siklus yang berlangsung dalam pengelolaan keuangan daerah?

Jawab:

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental. Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- 2) Perencanaan operasional. Tahap kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 3) Penganggaran. Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Pengendalian dan pengukuran. Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.
- 5) Pelaporan dan umpan balik Dan tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus kas dan catatan laporan keuangan.

42. Apa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah dan apa saja sumber pendapatan asli daerah?

Jawab:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah
- b. Hasil Pajak Daerah;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- c. Hasil Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya

merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007: 184). Menurut Ahmad Yani (2004: 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

e. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

43. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran daerah (belanja daerah)?

Jawab:

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada periode anggaran daerah yang berupa aktif keluar, timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

44. Sebutkan perbedaan antara ASP dengan Akuntansi Sektor Bisnis?

Jawab:

Akuntansi Sektor Publik:

- Tujuan Organisasi: memberikan pelayanan kepada publik
- Sumber Pendanaan: pajak, retribusi, sumbangan, subsidi, transfer pendapatan antar organisasi, utang atau obligasi
- Kepemilikan: kolektif oleh masyarakat

- Pertanggung Jawaban: masyarakat dan parlemen, badan pengawas, pemerintah pusat/daerah, investor/kreditor, pemberi donor
- Tolak Ukur: sulit diukur

Akuntansi Sektor Bisnis:

- Tujuan Organisasi: mencari keuntungan
- Sumber Pendanaan: modal sendiri, saldo laba, penerbitan saham, obligasi, utang bank
- Kepemilikan: pemegang saham
- Pertanggung Jawaban: pemegang saham dan kreditor
- Tolak Ukur: pencapaian laba

45. Siapakah Perancang Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia?

Jawab:

Segala peraturan dan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengelolaan organisasi sektor publik yang ditujukan kepada para pengelola organisasi sektor publik dan pihak-pihak yang terkait dengannya.

46. Jelaskan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan sektor privat?

Jawab:

Sektor Publik

- Pertanggungjawaban merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi sektor publik.
- Pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat, konstituen, dewan pengampu di LSM atau yayasan.

Sektor Privat

- Pertanggungjawaban merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi bisnis (swasta).

- Pertanggungjawaban dilakukan kepada *stakeholders* dan pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis (swasta).

47. Perbedaan realisasi anggaran sektor publik dan sektor privat?

Jawab:

Sektor Publik:

- Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi.
- Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran.

Sektor Privat:

- Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
- Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk).

48. Apa saja dasar hukum akuntansi sektor privat?

Jawab:

- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK): Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP): merupakan kodifikasi dari berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika.

49. Laporan keuangan apa saja yang harus dihasilkan pemerintah dan sebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah?

Jawab:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Republik Indonesia, 2010), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Neraca
- f. Laporan Arus Kas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

50. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan daerah?

Jawab:

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman daerah.

51. Apa yang dimaksud pengakuan aset tetap, utang jangka panjang dan ekuitas?

Jawab:

Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja). Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang

perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya (lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

52. Bagaimana Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah?

Jawab:

Realisasi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset adalah realisasi yang berasal dari berbagai usaha pemanfaatan aset yang telah dihapuskan. Usaha pemanfaatan ini dapat berupa penjualan, tukar guling (ruilslag), penyewaan, atau pelaksanaan kerja sama operasi. Untuk itu, sebelum ada usaha pemanfaatan ini, diasumsikan bahwa pada awal tahun anggaran sudah ada aset yang diidentifikasi telah dihapuskan dari pembukuan tetapi belum dilaksanakan usaha pemanfaatannya.

Dengan demikian, proses pemanfaatan aset daerah yang dihapuskan dimulai dari diterbitkannya surat persetujuan Kepala Daerah dan DPRD untuk menghapuskan suatu aset. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Daerah, Unit Perlengkapan menyusun dokumen bagi usaha pemanfaatan, yang bisa jadi berbentuk dokumen pelanggan atau surat penunjukkan kerja atau lainnya yang dapat dibenarkan oleh peraturan pemanfaatan aset daerah.

Berdasarkan pemberitahuan oleh Unit Perlengkapan, berbagai pihak seperti Rekanan akan memasukkan tawarannya kepada Unit Perlengkapan atau Panitia Pelanggan untuk mendapatkan hak membeli/tukar guling (ruilslag)/menyewa/atau melaksanakan kerja sama operasi.

Jika unit perlengkapan atau Panitia Pelelangan setuju menunjuk atau menetapkan pemenang lelang, maka Unit Perlengkapan menunjuk pembeli atau pelaksana kontrak.

Pembeli atau pelaksana kontrak kemudian mentransfer uang sebagai imbalan pemanfaatan aset Pemda ke Kas Daerah.

Atas penerimaan uang ini, Kas Daerah membuat Surat Tanda Setoran (STS), yang kemudian diserahkan kepada pihak pembeli atau pelaksana kerja dan kepada Unit Pembukuan. Oleh pihak pembeli atau pelaksana kerja, Surat Tanda Setoran (STS) ini dijadikan bukti untuk merealisasikan pengambilalihan aset atau pelaksanaan kerja sama operasi. Sedangkan oleh Unit Pembukuan, Surat Tanda Setoran (STS) ini dijadikan dokumen dasar bagi akuntansi atas penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah ini dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan.

53. Sebutkan dan jelaskan dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksi

Jawab:

- a) Akuntansi Pendapatan

Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- b) Akuntansi Belanja

Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

- c) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari:

- Penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan piutang daerah.

d) Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

e) Akuntansi Utang PPKD

Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

f) Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan terutama dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi.

54. Sebutkan dan jelaskan apa saja teknik akuntansi keuangan sektor publik!

Jawab:

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik:

1) Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (*double entry*). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.

2) Akuntansi Komitmen

Akuntansi Komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi

pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

3) Akuntansi Dana

Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana adalah metode yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan itu sendiri.

Terdapat dua jenis dana yang digunakan akuntansi sektor publik:

- a. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*)
Digunakan untuk mencatat nilai aktiva utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (*governments funds*)
- b. Dana yang tidak dapat lagi dibelanjakan (*nonexpectable funds*)
Untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (*properiority funds*)

4) Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil dan objektif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.

Contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk

mengoreksi hal tersebut kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (*overstated*). Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran (*unwise expenditure* atau *overspending*).

5) Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antar *Proprietary fund (full accrual)* dengan *Governmental fund (modified accrual)* karena biaya (*expenses*) diukur dalam *Proprietary fund*, sedangkan *expenditure* difokuskan pada general fund.

Expense adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur bukan expense.

55. Apakah perbedaan antara *cash basis* dengan *accrual basis*?

Jawab:

- a. basis kas: $\text{Penerimaan kas} - \text{Pengeluaran kas} = \text{Perubahan kas}$
- b. Basis akrual: $\text{Pendapatan (income)} - \text{biaya} - \text{biaya} = \text{Rugi/laba (splus/deficit)}$

- c. Pendapatan (*income*): penerimaan kas selama satu periode akuntansi – saldo awal piutang + saldo akhir piutang
- d. Biaya: kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal utang + akhir utang.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau terjadi (*incurred*) tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau dikeluarkan.

56. Mengapa *double entry* lebih diterapkan dari pada *single entry*?

Jawab:

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya *good governance* yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor public, perubahan dari *single entry* menjadi *double entry* dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

Single entry memang relatif mudah dan sederhana, akan tetapi alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem *double entry* ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini, merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem *double entry*, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat

57. Sebutkan dan jelaskan asas-asas umum Keuangan Negara sebagai pencerminan kaidah-kaidah yang baik?

Jawab:

Asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan negara penerapan kaidah yang baik:

- a. Asas Kepastian Hukum, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Asas Permainan yang Layak, asas ini menjelaskan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.
- c. Asas Kecermatan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat.
- d. Asas Keseimbangan, menurut asas ini dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman, haruslah seimbang nilainya dengan bobot pelanggaran atau kesalahan sehingga akan memenuhi keadilan.
- e. Asas Ketepatan dalam Mengambil Saran, untuk mewujudkan aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, maka haruslah segera membuat sistem dalam menyelesaikan permasalahan.

58. Apa saja ruang lingkup sistem pengelolaan Keuangan Negara sesuai UU Nomor 17 tahun 2003?

Jawab:

Ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan
- j. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

59. Sebutkan dan jelaskan apa saja fungsi APBN?

Jawab:

- a. Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- d. Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

60. Bagaimana sistem anggaran yang berlaku di Indonesia?

Jawab:

Sistem penganggaran yang berlaku di Indonesia menurut yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja berfokus pada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Dulu dalam pengalokasian anggarannya, Indonesia menggunakan sistem tradisional dimana berfokus pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga terbentuk alokasi anggaran yang menyeluruh atas program, tetapi telah berubah menjadi penganggaran berdasarkan kinerja. Penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang digunakan di Indonesia, berupa tingkat kinerja apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mendukung pencapaian hasil/outcome (baik outcome program ataupun outcome nasional). Pelaksanaan pencapaian outcome dilekatkan pada tugas dan fungsi suatu organisasi supaya jelas akuntabilitasnya.

61. Apa saja pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di Indonesia?

Jawab:

- a. Presiden menyampaikan rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Laporan yang dimaksud diatas setidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
 - c. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.
62. Apa yang dimaksud dengan Anggaran *Zero Based Budgeting* dan sebutkan keunggulan dan kelemahannya?

Jawab:

Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional.

- Keunggulan ZBB:
 - a) Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien
 - b) ZBB berfokus pada value for money
 - c) Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya
 - d) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer
 - e) Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran.

- f) Merupakan cara yang sistematis untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
- Kelemahan ZBB:
 - a) Prosesnya memakan waktu, terlalu teoretis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
 - b) ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek
 - c) Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju
 - d) Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses meranking dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
 - e) Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Selain itu dalam perankingan muncul pertimbangan subjektif/mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak objektif lagi.
 - f) Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus dalam anggaran
 - g) Implementasi ZBB menimbulkan masalah berperilaku dalam organisasi

63. Sebutkan Peraturan Keuangan Negara maupun daerah menurut Undang-Undang?

Jawab:

- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

64. Jelaskan Apa saja yang termasuk dalam Struktur APBN?

Jawab:

Struktur APBN yaitu:

a. Pendapatan dan Hibah

Pendapatan diperoleh dari sumber pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Bukan Pajak diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN, penerimaan instansi pemerintah yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi semisal biaya pembuatan SIM di Kepolisian, biaya nikah di KUA dan pendapatan lain-lain. Hibah adalah pemberian oleh negara lain kepada negara yang tidak perlu dikembalikan lagi, dapat berupa uang maupun barang.

b. Belanja

Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan instansi pemerintah, pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun misalnya gaji, pembelian alat tulis pakai habis, dsb. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membangun aset tetap dan tidak dilaksanakan secara rutin misalnya pembangunan jalan, jembatan dsb.

c. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka

program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

d. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

e. Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

f. Keseimbangan

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga

g. Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

65. Mengapa standar akuntansi pemerintah lebih diunggulkan daripada kerangka konseptual?

Jawab:

Standar Akuntansi Pemerintahan memang diunggulkan secara relatif terhadap kerangka konseptual karena kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. Keunggulan relatif ini membahas hal-hal dalam tujuan kerangka konseptual yang memberikan acuan bagi:

Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya;

- a. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar maka kerangka lah yang harus diunggulkan;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

66. Pada teknik menjurnal LRA, kenapa tidak ada yang dipasangkan dengan akun kas?

Jawab:

Hal ini disebabkan karena laporan realisasi anggaran merupakan salah satu dari laporan pelaksanaan anggaran yang berhubungan dengan laporan perubahan SAL, untuk dapat saling berhubungan antara laporan realisasi anggaran dengan laporan perubahan SAL, kedua laporan tersebut dijematani dengan akun SiLPA.

Sementara itu, laporan realisasi anggaran tidak berhubungan dengan neraca yang merupakan laporan finansial, dimana dalam neraca terdapat akun kas. Oleh karena itu, jurnal-jurnal realisasi anggaran tersebut tidak ada yang dipasangkan baik pada sisi debit maupun di sisi kredit dengan akun kas. Jadi, Akun-akun yang berpengaruh pada LRA akan di bawa pada

SiLPA/SiKPA. Sedangkan akun-akun yang berpengaruh pada Kas akan dibawa pada Neraca, LO, dan Perubahan Entitas.

67. Apa manfaat dengan adanya informasi dari realisasi anggaran?

Jawab:

Manfaat yang diperoleh dari informasi realisasi anggaran yaitu:

- a. Mencapai sejauh mana program-program kerja tingkat eksekutif atau legislatif dalam menjalankan program-program pemerintah sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Dapat memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
- c. Penyedia informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dan penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh.
- d. Membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan melalui informasi yang dihasilkan.

68. Apa perbedaan LRA dengan LO?

Jawab:

Yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, pada LRA pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

69. Apakah hanya pada akun belanja barang yang tidak dapat digolongkan menjadi aset tetap? Dan mengapa akun belanja barang digolongkan menjadi aset tetap?

Jawab:

Aset tetap merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak untuk diperjual-belikan. Belanja barang tidak termasuk aset tetap karena belanja barang tidak digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak juga diperjualbelikan. Belanja barang hanya digunakan untuk oleh pemerintah untuk keperluan habis pakai atau sebagai ATK.

70. Apakah yang dimaksud dengan audit kepatuhan? Apakah yang diaudit?

Jawab:

Audit kepatuhan yang menimbulkan manfaat akuntansi adalah sebuah proses yang menentukan kelayakan pihak yang diaudit yaitu telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau belum. Auditor harus memastikan proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan yang berlaku.

Contoh kasusnya berikut ini. Audit Kepatuhan terhadap tahap pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah memilih auditor eksternal untuk mengaudit proses pembangunan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Ada dokumen-dokumen legal yang mengatur hal-hal tersebut sehingga auditor harus melakukan observasi dan penelitian tentang kesesuaian standar dari segi budget, pelaksanaan, penempatan, tim dan lainnya sesuai fungsi akuntansi secara umum.

71. Apakah ada hubungan antara akuntansi sektor publik dengan sector bisnis, dan sektor sosial?

Jawab:

Tentunya ada. Karena, Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu Negara yang dampak berdampak pada sektor yang lain, yaitu sektor swasta maupun sosial. Kegagalan sektor publik dalam bentuk kegagalan pemerintah (Government failure), kelumpuhan birokrasi, mafia hukum, kekacauan politik, perang, terorisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat mengganggu sektor bisnis dan social yang dapat memicu kondisi kritis suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk kemajuan ekonomi, social, politik, dan budaya bangsa maka pembangunan sektor publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

72. Apa pengertian sederhana yang saudara ketahui tentang desentralisasi?

Jawab:

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penugasan dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (Litvack, Ahmad dan Bird, 1998: 7). Jadi intinya desentralisasi fiscal berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

73. Berikan contoh dalam hal apa saja desentralisasi bisa dilakukan di suatu negara?

Jawab:

Contoh dalam hal desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 pemerintah Indonesia melaksanakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kemudian daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah PAD, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terakhir melalui Pinjaman daerah. Di samping itu daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah, dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran penyediaan sarana dan prasarana daerah.

74. Menurut saudara, apakah Desentralisasi yang kini tengah berlangsung di Indonesia murni sebagai kebutuhan bangsa Indonesia atau ada faktor eksternal yang kuat mempengaruhi?

Jawab:

Pengambilan keputusan dan pengambilan suatu kebijakan-kebijakan tidaklah lagi wewenang dari pemerintah pusat dan sudah diserahkan hak sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang mana tertuang pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tahun 2004. Menurut pendapat saya semua tergantung dari mental individu yang duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah, karena di masa sekarang kebijakan ini sudah disalahartikan oleh masing-masing individu untuk berlomba-lomba mencari keuntungan pada setiap level

jabatannya di pemerintahan, jelas ini tidak diharapkan dari lahirnya undang-undang 32 tahun 2004.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada saat ini berasal dari peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan PP No. 71 tahun 2010, terutama untuk mengakomodasi pemberlakuan prinsip akrual dalam ranah akuntansi pemerintahan di Indonesia

75. Jelaskan “Organisasi Sektor Publik” dan Sebutkan Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik yang ada di Indonesia?

Jawab:

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan publik, memberikan pelayanan, dan memenuhi kebutuhan publik,

Contoh organisasi sektor publik: organisasi Pemerintah Pusat, organisasi Pemerintah Daerah, organisasi Parpol dan LSM, organisasi Yayasan, organisasi pendidikan dan kesehatan, dan organisasi Keagamaan.

76. Apa pengaruh positif dan negatif pajak dengan keuangan negara?

Jawab:

- Pengaruh positif:
 - a. Dapat membiayai kebutuhan pemerintah untuk negara.
 - b. Memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi naik
 - c. Untuk pembangunan negara agar lapangan pekerjaan bertambah.
 - d. Dapat memajukan ekonom negara dalam sektor produksi (barang, jasa, dll).
- Pengaruh negatif:
 - a. Membuat konsumsi masyarakat menurun
 - b. Pendapatan disosibel menurun (pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi masyarakat

- c. Pendapatan yang diterima seorang tenaga kerja berkurang.
- d. Adanya penyimpangan dalam faktor produksi

77. Sebutkan alasan anggaran sektor publik menjadi penting?

Jawab:

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan trade offs.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

78. Sebutkan prinsip anggaran sektor publik?

Jawab:

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

- a. Otorisasi oleh legislatif anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut
- b. Komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

- c. Keutuhan anggaran semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).
- d. Nondiscretionary appropriation. jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Periodik anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan
- f. Akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
- g. Jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan
- h. Diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

79. Sebutkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

Jawab:

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- b. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah daerah atau sebaliknya. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

80. Sebutkan faktor yang mempengaruhi APBN dan APBD?

Jawab:

Anggaran dalam suatu negara baik itu pusat (APBN) maupun daerah dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- Kondisi awal suatu daerah, hal ini dilihat dari kesejahteraan daerah atau negara tersebut sebelum tahun anggaran.
- Pertumbuhan penduduk, tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk mempengaruhi besarnya anggaran. Karena daerah/negara yang jumlah penduduknya banyak memerlukan anggaran negara lebih besar.
- Perkembangan pendapatan perkapita, hal ini mempengaruhi anggaran negara dan daerah.
- Tingkat inflasi, tingginya inflasi akan meningkatkan nilai anggaran.
- Pembangunan fasilitas umum baru, untuk sebuah pembangunan pemerintah memerlukan anggaran yang lebih besar daripada anggaran sebelumnya.
- Sumber pendapatan atau investasi baru, hal ini akan meningkatkan anggaran suatu negara.
- Perubahan peraturan pemerintah mempengaruhi besarnya anggaran, karena besar-kecilnya anggaran diatur oleh pemerintah melalui undang-undang.

81. Jelaskan apa tujuan dari dilakukannya pengelolaan keuangan daerah?

Jawab:

Pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan utama yakni agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

82. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berjenis pengelolaan umum kepala daerah merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, coba anda sebutkan dalam bentuk apa saja kekuasaan kepala daerah?

Jawab:

- Pengelolaan Umum dalam hal ini Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
- Pengelolaan Khusus dalam hal ini adalah bendahara umum daerah yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah

83. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berjenis pengelolaan umum kepala daerah merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, coba anda sebutkan dalam bentuk apa saja kekuasaan kepala daerah?

Jawab:

- Fungsi perencanaan umum.
- Fungsi pemungutan pendapatan.
- Fungsi perbendaharaan umum daerah.
- Fungsi penggunaan anggaran, serta
- Fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban

Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh Kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan daerah

84. Siapa saja yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah?

Jawab:

Pemilik kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

- Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD
- Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah

85. Apa saja tugas dari pejabat pengelola keuangan daerah?

Jawab:

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

86. Salah satu dari diterapkan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya APBD, jelaskan apa pengertian dari APBD?

Jawab:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

87. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dikatakan jauh lebih tertinggal dibanding dengan akuntansi sektor swasta. Mengapa

dikatakan demikian? Dan jelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketertinggalan tersebut?

Jawab:

Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor bisnis dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering dijadikan pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah Karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Bahkan pelayanan di era reformasi dinilai berjalan di tempat kalau tidak dikatakan setback. Sering muncul berbagai keluhan bahkan beberapa aksi demonstrasi mencerminkan rendahnya pelayanan publik seperti aksi buruh maupun aksi penolakan Free Port di Irian Jaya. Dan pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan pelayanan publiknya, terlebih di era reformasi berbagai upaya telah dilakukan baik dari sisi hukum ketatanegaraan, politik, peraturan perundangan, perekonomian maupun manajemen pengelolaan keuangan Negara. Spirit berbagai perubahan tersebut adalah untuk membentuk a good government of Indonesia. Tahun 2006 adalah momentum bagi bangsa Indonesia karena pada tahun inilah terbit laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Memang pada bulan Juni 2005, telah ditetapkan PP 24/2005 ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena sektor pemerintah belum mempunyai standar akuntansi sejak Indonesia merdeka.

88. Apakah dasar akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis?

Jawab:

- a. Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik:
 - 1) Standar akuntansi pemerintah (SAP)
 - Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005.
 - Lampiran I pengantar standar akuntansi pemerintahan
 - Lampiran II kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 - Lampiran III PSAP 01-11
 - 2) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
 - PSAK 1 -59
 - 3) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- b. Dasar Hukum Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta)
 - 1) Pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK)

Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacuh dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan. Standar akuntansi keuangan, sebagai pedoman khusus penyusunan dan penyajian laporan keuangan, merupakan hal yang sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dipahami, dapat diperbandingkan, serta tidak menyesatkan
 - 2) Standar profesional akuntan publik (SPAP)

SPAP merupakan kodifikasi dari berbagai pernyataan standar teknik dan aturan etika. Pernyataan standar teknik meliputi pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi, pernyataan jasa akuntansi dan review, pernyataan jasa konsultasi, dan pernyataan standar pengendalian mutu. Standar ini diterbitkan oleh IAI – dewan standar profesional akuntan publik.

89. Apakah Perbedaan Anggaran sektor publik dan sektor swasta
Jawab:

Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.

Tabel Penganggaran Dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Penganggaran	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program	Penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha
Dipublikasikan Untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat	Tidak dipublikasikan
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D, legislatif, dewan pengurus	Disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha

90. Apakah Perbedaan Realisasi Anggaran sektor publik dan sektor swasta?

Jawab:

Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor bisnis (swasta), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tuntutan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya.

Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Tabel Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

REALISASI ANGGARAN	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi	Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran	Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk)

91. Apakah Persamaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta:

Jawab:

Persamaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

- Kriteria *validitas* dan *reliabilitas* dokumen sumber;
- Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas publik;
- Siklus akuntansi dapat diperbandingkan;
- Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan organisasi independen;
- Laporan keuangan pemerintahan dan organisasi swasta bisa diakui sebagai dasar hukum.

92. Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!

Jawab:

Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual. Pertanggung jawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (*single entry accounting*) berdasarkan basis kas.

PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir. 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah. Tahap I: yang berbasis computer dengan bantuan biaya dari Bank Dunia. Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office. Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I. tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan. Dengan keluarnya paket undang-undang keuangan mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah sangat diperlukan BPK dalam menerbitkan opini audit.

93. Sebutkan Tujuan Laporan Keuangan, apa itu entitas akuntansi, dan apa itu entitas pelaporan!

Jawab:

Tujuan Laporan Keuangan Pengguna laporan keuangan pemerintah ini ada pada beberapa kelompok, namun tidak terbatas pada: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (d) pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, yakni:

- Wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
- Kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya, Contoh: (a) Kantor Wilayah (b) Satuan Kerja.

94. Apakah isi dari Standar Akuntansi Pemerintah itu!

Jawab:

Isi dari SAP antara lain meliputi Definisi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan suatu transaksi Keuangan. SAP terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

PSAP terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Selain kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 11 PSAP tersebut SAP dapat dilengkapi dengan interpretasi dan buletin teknis sampai saat ini telah disusun 7 buletin teknis sbb:

1. Buletin teknis SAP nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat
2. Buletin teknis SAP nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
3. Buletin teknis SAP nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda sesuai SAP dengan Konversi
4. Buletin teknis SAP nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
5. Buletin teknis SAP nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan
6. Buletin teknis SAP nomor 06 tentang Akuntansi Penyusutan
7. Buletin teknis SAP nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir

95. Jelaskan pengertian, tujuan dan ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!

Jawab:

Tujuannya adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah, dan menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintah. Ciri-cirinya adalah Basis Akuntansi, Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan sistem pembukuan berpasangan.

96. Bagaimana basis akuntansi diterapkan pada instansi pemerintahan?

Jawab:

Tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Kebijakan itu tentunya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis basis akuntansi. Di Indonesia sendiri, pada level undang-undang sebenarnya mengamanatkan penggunaan basis akrual secara penuh. Hal ini dapat dilihat pada UU 17/2003 tentang keuangan negara pasal 1 dan pasal 36 ayat (1) serta UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara pasal 12, 13 dan 70.

Kedua undang-undang itu menargetkan penerapan basis akrual penuh pada tahun 2008. Namun praktik untuk mencapai maksud tersebut harus dilalui dengan perjalanan yang panjang. Pada tahun 2005 pemerintah menetapkan PP 24/2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Menurut PP tersebut akuntansi pemerintah Indonesia menggunakan basis kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan

ekuitas dalam neraca. Praktik ini menggunakan basis akuntansi modifikasi.

97. Jelaskan Pengertian Standar Nomenklatur dan Berikan 2 Contohnya!

Jawab:

Standar Nomenklatur merupakan daftar perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Contoh:

- A. Kode angka atau alfabet urut;

1. 1 Kas
2. Investasi sementara
3. Piutang
4. Cadangan kerugian piutang
5. Persediaan

- B. Kode angka blok;:

- 1- 24 Aktiva Lancar
25 – 39 Investasi Jangka Panjang

98. Uraikan Pengertian Perencanaan Publik?

Jawab:

Perencanaan adalah proses yang dimulai dengan penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Tahapan:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

99. Jelaskan implikasi terbitnya pp 71 tahun 2010 terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah?

Jawab:

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

100. Sebutkan dan jelaskan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan suatu entitas pemerintahan?

Jawab:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Anessi-pessina, E. (2018) *Outcome-Based Performance Management in the Public Sector*. Italia: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-57018-1.
- Bastian, I. (2010) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Brimson, J. A. and Antos, J. (1994) *Activity-Based Management for Service Industries, Government Entities and Non-Profit Organizations*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Drebin, A. R., Chan, J. L. and Ferguson, Lorna, C. (1981) *Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units: A Research Study*. Edited by N. C. on G. Accounting. Chicago.
- Gade, M. (2000) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Glynn, J. J. (1993) *American Accounting Association*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Halim, A. (2007) *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanley (1992) 'Corporatism and the European Labour Market after 1992', *an International Journal of Employment Relations*, pp. 567-589.
- Indonesia, R. . U. 4. (2005) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. doi: 10.1016/j.aquaculture.2007.03.021.
- Kam, V. (1990) *Accounting theory*. second. Newyork: John Wiley and Sons. inc.
- Kooiman, J. and Eliassen, K. A. (1993) *Managing Public Organizations. Lessons From Contemporary European Experience*. London: Sage Publications.
- Mamesah, D. (1995) *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2006) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nordiawan, D. (2006) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2007) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Presiden Republik Indonesia (1999a) *UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia (1999b) *UU RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia (2004a) *UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia (2004b) *UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia (2009) *UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia (2010) *PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Sawyer, Dittenhofer and Cheiner, S. (2005) *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) *Republik Indonesia*. Norwalk: GASB. doi: 10.1007/978-3-319-57018-1.
- Vatter, W. J. (1947) *The Fund Theory of Accounting and Its Implications for Financial Reports*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Yani, A. (2004) *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Glosarium

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
COSO	: <i>Committee of Sponsoring Organizations</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTP	: Daftar Transaksi dan Posting
GAAP	: Generally Accepted Accounting Principles
GDP	: Pertumbuhan pendapatan perkapita Domestik
GNP	: Pertumbuhan pendapatan perkapita Nasional
IFAC	: Federasi Akuntan Internasional
IPSAS	: Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik
LO	: Laporan Operasional
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PABU	: Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PSAK	: Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
Renja	: Rencana Kerja
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPAP	: Standar Pemeriksaan Akuntan Publik
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
STP	: Surat Tanda Setoran
UNDP	: United Nation Development Program

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban

Monika Handayani

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNyalah Buku ajar ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan semoga bisa bermanfaat sebagai media ajar bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, khususnya untuk mahasiswa semester 5 (lima) D3 Komputerisasi Akuntansi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, disamping itu buku ajar ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur dalam memperkuat pemahaman terhadap akuntansi sektor publik yang biasanya digunakan untuk pemerintahan maupun organisasi non profit.

Buku Ajar ini disusun berdasarkan teori dan praktik yang di dapat oleh penulis baik dari bangku kuliah, maupun praktik di dunia kerja, beberapa kasus diambil dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bidang akuntansi sektor publik. Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal dan jawaban yang membantu pembaca semakin memahami akuntansi sektor publik.



Penerbit Poliban Press

Redaksi :

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp : (0511)3305052

Email : press@poliban.ac.id

ISBN 978-602-53809-9-0

